

Mengajak Orang Muda Mengusahakan Transformasi Desa: Sebuah Autoetnografi

Nurhady Sirimorok

Ketua Badan Pengurus Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo,
Maros

✉ nurhadys@gmail.com

SARAN PENULISAN PUSTAKA: SIRIMOROK, N. 2017. "Mengajak Orang Muda Mengusahakan Transformasi Desa: Sebuah Autoetnografi." *Wacana* 36: 147–182.

© 2017 PENULIS. Diterbitkan oleh INSISTPress (anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST]). Tulisan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0).



Abstrak Artikel ini mengisahkan dan mendiskusikan, dalam bentuk autoetnografi, Pelatihan Penelitian Desa yang diselenggarakan Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo di Sulawesi Selatan. Penulis menarasikan latar intelektual dan sosial yang membentuk rancangan, proses aktual, serta sejumlah poin pembelajaran dari pelatihan tersebut. Autoetnografi, yang mengakui bias perspektif penulis, membuka peluang partisipasi lebih luas mendiskusikan upaya mengajak orang muda bekerja untuk transformasi perdesaan Indonesia lewat pelatihan. Refleksi dari proses-proses di atas menunjukkan perlunya keluwesan mengubah asumsi dan rancangan pelatihan di tengah jalan; bagaimana peserta mengalami pengayaan informasi dan perspektif; keterasingan pengorganisasian, *participatory action research*, dan desa dari wacana dominan yang akrab bagi orang muda Indonesia; dan kesalahpahaman meluas mengenai kata “pelatihan”.

KATA KUNCI: orang muda, autoetnografi, *participatory action research*, pelatihan, transformasi perdesaan

Abstract *This article narrates and discusses, in autoethnographic form, Rural Research Training held by Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo in South Sulawesi, Indonesia. The author relates intellectual and social backgrounds of the training design, its actual processes, and a number of learning points. Acknowledging the author's bias, an autoethnographic writing opens opportunity for wider participation in discussing efforts to engage youths to work toward rural transformation through such trainings. Reflection on the processes shows the importance of flexibility to change the initial assumptions and design during the course of the training; how participants undergo information and perspective enrichment; the alienation of community organizing, participatory action research, and the rurals from dominant discourse familiar to Indonesian youths; and widespread misunderstanding of “training”*

KEYWORDS: youth, autoethnography, *participatory action research*, training, rural transformation

Dari Satu Latar Mengejutkan

Ketika saya diminta menulis tema seputar Sekolah Transformasi Sosial (STS) yang dijalankan jaringan Indonesian Society for Social Transformation (INSIST),¹ saya tak berpikir panjang untuk menerimanya. Ini suatu kejutan. Saya merasa memperoleh peluang emas untuk melakukan sesuatu yang sudah cukup lama saya rencanakan. Seseorang harus menuliskan prakarsa STS. Bagi saya, permintaan ini adalah tugas dari organisasi akan pentingnya terlibat dan berkontribusi dalam kerja terorganisir (via organisasi) dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, setelah mengikat komitmen, cukup lama saya berpikir tentang bagaimana saya akan menuliskannya. Saya terus bertanya-tanya bagaimana menuliskan hasil penelitian tentang sesuatu yang melibatkan saya di dalamnya dan ingatan saya sendiri termasuk dalam kumpulan datanya? Pertanyaan ini terus menghantui. Bagaimana saya akan “mengeluarkan” diri dari subjek yang akan saya tuliskan atau bagaimana supaya saya tidak “terbawa perasaan”? Bagaimana memperlakukan diri saya sebagai subjek penelitian sekaligus peneliti itu sendiri? Saya harus menemukan jalan lain. Tulisan ini harus lebih reflektif dan bersifat mikro. Setelah melewati penelusuran literatur metodologi, pada saat-saat menjelang tenggat, saya teringat autoetnografi.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai autoetnografi, saya akan menceritakan secara ringkas sejarah Sekolah Transformasi Sosial, istilah payung dari pelatihan yang saya jadikan studi kasus dalam tulisan ini. Saya sendiri mulai mendengar dan membaca tentang STS sejak 2010. Dalam laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus INSIST 2011–2015 (2016: 11–13), “penguatan jaringan STS” disebutkan sebagai bagian dari “rancangan arah strategis” baru INSIST dan dibahas cukup terperinci dengan matriks yang memperbandingkan situasi aktual STS di seluruh anggota jaringan INSIST.

Berangkat dari pengalaman, perbincangan dengan para kolega di INSIST, dan penelusuran beberapa dokumen organisasi, saya coba mendefinisikannya secara tentatif di sini untuk kepentingan pembaca tulisan ini. STS adalah kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi (calon) pegiat organisasi masyarakat sipil dan gerakan sosial yang secara spesifik diarahkan untuk mengusahakan transformasi sosial, terutama tetapi tidak eksklusif, di perdesaan. Transformasi dalam kerangka ini dimaknai sebagai perubahan struktur sosial, dari struktur yang cenderung timpang dan menindas menjadi struktur yang lebih adil

1. INSIST adalah organisasi payung dari federasi atau jaringan organisasi masyarakat sipil di Jakarta (Komunitas Salemba), Yogyakarta-Solo (Komunitas Yogyakarta-Solo), Jambi (Yayasan Mitra Aksi), Sulawesi Selatan (Komunitas Inninawa), Maluku (Komunitas Maluku) dan Nusa Tenggara (Komunitas Flobamora), dan Bali (Komunitas Bali). Kantor sekretariat INSIST berkedudukan di Yogyakarta.

dan demokratis. Pendekatan utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengorganisasian rakyat. Sekolah ini

(...) dimulai dengan pemetaan untuk membuka kesadaran baru mengenai kehidupan, menyusun rencana-rencana perubahan, dan menjadi alat politik dalam menghadapi kekuatan dari luar, diimbangi dengan penguasaan teknologi tertentu.

(...) dapat diselenggarakan dengan berkolaborasi dengan sekolah formal namun dengan proporsi pengelolaan terbesar pada anggota *INSIST*, atau dikelola sepenuhnya [oleh anggota *INSIST*]. Penyelenggaraan oleh anggota *INSIST* dan wajib [dilakukan] di luar skema proyek, terkecuali sepenuhnya penentuan agenda proyek selaras/utuh dengan agenda STS (...). Wajib diselenggarakan di tempat khusus yang bermanfaat sebagai tempat ngumpul komunitas ini, dikelola dengan pendekatan pendidikan dan media populer, dan diujung proses dapat menghasilkan dokumentasi tertentu.²

Peserta STS berasal dari dua lingkup, yakni “dari luar” dan “dari dalam” komunitas tempat pengorganisasian berlangsung. Dalam tulisan ini, saya hanya akan bercerita tentang STS untuk pegiat “dari luar” komunitas dan membatasi diri pada STS yang tengah berjalan. Saya tidak akan membahas STS yang baru dirintis dan sudah tidak aktif.

Sejak 2000, *INSIST* telah mengadakan serentetan pelatihan yang dinamai *INVOLVEMENT* (Cahyono 2003; Hadi *et al.* 2005; Nuryatno 2009; Sangkoyo 2003). Para peserta mengikuti berbagai kuliah, simulasi, lokakarya, dan praktik fasilitasi selama enam bulan di Yogyakarta dan sekitarnya, sebelum kembali untuk melakukan praktik pengorganisasian selama enam bulan juga di wilayah kerja organisasi masing-masing. Pada 2004, pelatihan ini mengalami “desentralisasi”, dalam arti diadakan oleh anggota jaringan *INSIST* di lokasi masing-masing. Program ini berlangsung di beberapa jaringan sampai terhenti pada 2007 (Dewan Pengurus *INSIST* 2016: 28).

Pada 2008, tiga anggota jaringan *INSIST* bekerjasama melaksanakan program serupa yang diberi nama Perkauman Pendidik untuk Perubahan (*PERDIKAN*).³ Program ini agak berbeda sebab dirancang sebagai pengorganisasian masyarakat desa dalam jangka panjang, bukan “pelatihan” sebagaimana lazimnya dikenal. Para peserta/pengorganisir melewati proses refleksi pembelajaran melalui kerja pengorganisasian dalam serangkaian lokakarya berkala, yang sekaligus menjadi wadah untuk merencanakan kerja pengorganisasian selanjutnya. Dilihat dari proses yang dilewati (praksis via pengorganisasian), tujuan

2. Pemaknaan ini terumuskan dalam rapat Majelis Umum *INSIST* ke-4 pada Januari 2016 di Yogyakarta, dan terangkum dalam dokumen “Prinsip-Prinsip STS”.

3. Mitra Tani, Yayasan Pendidikan Rakyat Indonesia (YPRI), dan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP). Mitra Tani dan YPRI kini sudah bubar.

(transformasi sosial via terbentuknya pranata baru), dan pesertanya (para pengorganisir rakyat), program ini dapat dikategorikan sebagai STS. Karena berskala lokal, program ini tidak merekrut peserta dari anggota jaringan INSIST di luar Yogyakarta dan sekitarnya. Program ini terhenti pada 2011, dengan sebagian kader yang masih terus melanjutkan pengorganisasian di lokasi masing-masing. Menjelang akhir program, saya diminta untuk melakukan evaluasi dan menuliskan hasilnya, yang kemudian terbit sebagai buku tentang pengorganisasian rakyat berbasis kasus-kasus dalam program PERDIKAN (Sirimorok 2010b).

Pelatihan-pelatihan sejenis terus berlangsung secara sporadis di beberapa anggota jaringan INSIST lewat pemagangan atau *in-house training*. Pelatihan-pelatihan itu digelar sebagai “persiapan” pengembangan kapasitas (*capacity building*) anggota jaringan dalam kerangka program/proyek tertentu. Sesi-sesi yang mengajarkan elemen-elemen penelitian partisipatoris berorientasi aksi dan pengorganisasian rakyat disisipkan guna menyiapkan kader baru sekaligus menguatkan kapasitas staf organisasi untuk bekerja di desa.

Alasan yang sering saya dengar dan alami mengenai sulitnya mengadakan pelatihan khusus yang dapat dikategorikan sebagai STS ialah kurangnya lembaga dana yang tertarik untuk membiayainya, keadaan yang agak berbeda bila dibandingkan dengan masa awal reformasi. Dalam konteks kurangnya pegiat yang mau berkomitmen jangka panjang untuk bekerja di desa, dan fakta bahwa kami selalu kekurangan orang dengan keterampilan khusus untuk kerja-kerja semacam itu, STS justru sangat dibutuhkan. Apalagi, STS merupakan bagian penting dalam misi organisasi. Berulang kali saya mendengar ungkapan seperti “kita kurang orang” atau “ada lagi yang pergi” ketika kami berencana memulai atau melanjutkan pengorganisasian di desa. Kami senantiasa membicarakan bagaimana menyiapkan generasi baru, melatih orang muda agar mempunyai komitmen dan keterampilan yang dibutuhkan. Singkat kata, kami menganggapnya sebagai krisis yang serius.

Namun, pada 2015, terjadi kejutan besar. Tiga pelatihan yang dapat dikategorikan sebagai STS diselenggarakan lagi oleh INSIST dan anggota jaringannya, masing-masing bertempat di Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Jambi.⁴ Kali ini, rangkaian STS tersebut digelar sebagai program yang berdiri sendiri, sebagaimana sebelumnya INVOLVEMENT diselenggarakan. Bahkan, INVOLVEMENT juga dilaksanakan kembali pada tahun itu. Pelatihan-pelatihan ini mempunyai rancangan program, kerangka jadwal, staf fasilitator/pelatih, dan alokasi dana tersendiri. Program-program STS ini dilaksanakan dengan nama berbeda-beda. Seluruh pelatihan ini diarahkan untuk mendidik kader atau “calon pegiat” yang akan dan sementara bekerja di desa-desa

4. Sekretariat INSIST, Komunitas Innawa, dan Yayasan Mitra Aksi. Butuh tulisan lain untuk membandingkan pelatihan-pelatihan yang dikembangkan di tempat berbeda ini.

lokasi kerja anggota jaringan dan organisasi mitra. Peserta pelatihan-pelatihan ini berusia muda, paling tua sekitar 30-an tahun. Masih perlu penelusuran lebih mendalam mengapa kejutan ini bisa terjadi, tetapi saya menangkap semakin menguatnya gagasan STS sebagai tulang punggung penggerak organisasi dan mendesaknyanya kebutuhan akan pegiat-pegiat (dari luar komunitas) untuk melanjutkan kerja-kerja pengorganisasian. Dua hal ini mendorong anggota jaringan *INSIST* bekerja lebih serius untuk menyediakan sumberdaya, dana, dan orang agar dapat menyelenggarakan STS.

Di latar yang mengejutkan inilah—jaringan *INSIST* menyelenggarakan tiga pelatihan serupa dalam satu tahun—saya terlibat secara langsung. Saya terlibat sebagai perancang sekaligus fasilitator penuh pada salah satu dari tiga pelatihan ini, sehingga mengharuskan saya menghabiskan dua dari tiga bulan durasi pelatihan untuk menemani peserta berlatih di lapangan. Pelatihan inilah, Pelatihan Penelitian Desa (PPD), yang menjadi cerita utama dalam tulisan ini. Di kedua pelatihan lain, saya hanya terlibat sebagai pengampu salah satu keterampilan yang dilatihkan, yaitu “menulis”.

Saya akan bercerita bagaimana saya tiba pada bentuk PPD, bagaimana PPD berlangsung, dan bagaimana reaksi para peserta. Saya akan memanfaatkan ingatan akan peristiwa, kegiatan, percakapan, situasi, dan kepustakaan. Dengan demikian, sebagai perancang dan fasilitator, saya sendiri belajar memetakan pikiran tentang apa saja unsur yang berkontribusi dalam membentuk rancangan pelatihan ini dan apa saja yang saya pelajari dari pelaksanaannya.

Mengapa Autoetnografi

Saya baru mengenal autoetnografi sekitar lima tahun lalu ketika sedang mencari bahan untuk sebuah pelatihan penelitian dan penulisan. Menelusuri kepustakaan mengenai kata ini, saya belajar bahwa autoetnografi berkembang pesat sejak setidaknya dua dekade lalu, menyusul gelombang besar kritik terhadap paradigma dan metodologi positivisme (Ellis *et al.* 2011). Autoetnografi berkembang antara lain dari perlawanan terhadap dominasi klaim objektivitas positivisme dalam memvalidasi penelitian. Keyakinan bahwa realitas bisa disajikan tanpa bias peneliti sama sekali telah banyak ditolak, karena pada dasarnya realitas merupakan hasil konstruksi sang peneliti, terbentuk dari kerangka pemikiran yang telah akrab bagi peneliti, sekeras apa pun dia berusaha untuk objektif (Dyson 2007). Hasilnya, orang bisa mengakui nilai penting subjektivitas dari pengalaman unik seseorang dalam menyumbang pengetahuan akan dunia sosial. Autoetnografi juga berusaha melawan otoritas “suara” peneliti etnografi yang,

dengan meneliti kelompok masyarakat lain (atau liyan), kerap kali menutupi suara dari kelompok masyarakat itu sendiri (Wall 2006: 2).

Dua kritik atas positivisme tersebut sudah akrab bagi saya melalui bacaan-bacaan teori pascamodern yang saya cerap sejak masa awal reformasi. Ketika itu, semua hal tentang narasi besar, termasuk negara, saya lihat sebagai sumber penindasan dan dengan demikian adalah musuh. Bacaan-bacaan yang menolak positivisme, baik dari paradigma konstruktivisme maupun kritis, saya anggap menyajikan alternatif untuk membangun masa depan baru yang terbuka menjelang dan apalagi setelah runtuhnya rezim Soeharto.

Namun, baru pada masa-masa setelahnya saya banyak berkenalan dengan bacaan yang lebih terperinci tentang bagaimana persisnya alternatif itu (bisa) terwujud. Dipadukan dengan pengalaman, saya merasa bahwa saya tidak sepenuhnya sepakat pada asumsi-asumsi dasar pascamodernisme yang merelatifkan segala pengetahuan atau kebenaran, termasuk menganggap sama sekali tidak ada yang lebih benar daripada yang lain. Mempraktikkan dekonstruksi ala pascamodernisme tidaklah cukup,⁵ sebab orang harus mengambil keputusan untuk bisa bertindak, sehingga secara sadar harus memilih satu dari sekian banyak kebenaran yang dapat dia jangkau. Bahkan, pilihan sadar yang didasari informasi yang lengkap menjadi lebih penting ketika kita berbicara tentang keputusan yang memengaruhi kehidupan orang banyak. Tetapi, saya tetap berpikir bahwa semua teori itu berguna untuk menunjukkan cara-cara baru melihat dunia, dan memuluskan perkembangan teori-teori kritis yang bersifat emansipatoris—membongkar dominasi metodologi yang berasal dari paradigma positivisme. Salah satunya yaitu tentang legitimasi subjektivitas, yang membuat kita lebih sensitif terhadap suara-suara dari kelompok sosial berbeda (sering merupakan kelompok yang tertindas dan terbungkam). Dampaknya, pengalaman pribadi dapat diterima sebagai salah satu bentuk pengetahuan yang sah dan dapat menyumbang pembentukan pemahaman kita akan fenomena sosial tertentu.

Dengan kerangka pikir semacam itu, autoetnografi mengizinkan saya untuk meletakkan pengalaman pribadi sebagai topik penelitian atau mencoba memahami konteks sosial tertentu lewat pengalaman pribadi tersebut (Ellis *et al.* 2011; Schoepflin 2009; Wall 2006). Dengan demikian, pendekatan ini meminta saya untuk menggeledah ulang pemahaman sendiri akan dunia sosial yang selama ini saya terima begitu saja (Humphreys 2005). Autoetnografi juga mengizinkan saya untuk menampilkan bias secara terbuka. Sebagaimana dituliskan Ellis dan Bochner (2000), “(...) tidak perlu takut dengan bias data karena bias memang *seharusnya* terjadi” (dikutip dalam Purwanto 2011: 180),

5. Menurut para penganut pasca-modernisme skeptis, tujuan dekonstruksi adalah “(...) demistifikasi suatu teks, menggeledah teks tersebut untuk menyingkap hierarki internal yang bersifat arbitrer (sewenang-wenang) beserta asumsi-asumsinya. Dekonstruksi menunjukkan kecacatan dan struktur metafisik laten dalam suatu teks. (...) menemukan ambivalensi, kealpaan, logosentrisitas” (Rosenau 1992: 120). Dekonstruksi dalam pemaknaan ini bukanlah proses awal untuk dilanjutkan dengan penawaran atau pengembangan tindakan-tindakan alternatif.

sebab yang penting ialah membuat catatan terperinci mengenai apa yang secara nyata terjadi, termasuk kenyataan adanya bias penulis. Ini memungkinkan saya untuk mengulas topik secara lebih luwes menurut apa yang saya amati dan alami (Dyson 2009). Implikasinya, saya dapat merangkai kerangka cerita menurut poin-poin pembelajaran penting yang saya sarikan dari pengalaman, kesaksian, dan bacaan. Autoetnografi memang sekaligus metodologi dan gaya menulis, yang menghubungkan pengalaman personal dengan dunia sosial. Bentuk naratif autoetnografi menghadirkan kata ganti tunggal pertama “saya” sebagai bentuk tanggung-gugat (*accountability*) penulis agar menghadirkan informasi yang dapat dipercaya, membuka pintu kritik dan dialog bagi pembaca, serta menggambarkan secara terbuka realitas tanpa klaim sebagai suara kebenaran tunggal (Dyson 2009). Dengan begitu, terbuka bagi setiap orang untuk bisa memberi andil dalam melengkapi informasi dan analisis mengenai subjek yang akan saya ceritakan. Dengan kata lain, metodologi ini bersifat partisipatoris.

Autoetnografi juga menyimpan potensi emansipatoris dalam tindakan sosial, bukan sekadar emansipasi individual penulis. Wataknya yang secara eksplisit menyampaikan posisi penulis dalam subjek yang dituliskannya menunjukkan bahwa autoetnografi juga berbicara tentang bagaimana seseorang melakukan sesuatu dan meninggalkan efek di sana, begitu pula sebaliknya. Karena itu, menulis autoetnografi juga bisa dilakukan dengan maksud terbuka untuk mengubah sesuatu atau menyampaikan bagaimana (maksud) tindakan tersebut dilakukan, agar para pembaca bisa belajar dari tulisan tersebut dan tergerak untuk melakukan tindakan, mungkin dengan lebih baik.

Argumen-argumen paradigmatis yang mendukung autoetnografi cukup mudah meyakinkan saya. Tetapi, masih ada pertanyaan tentang signifikansi autoetnografi. Carolyn Ellis, orang yang sejauh penelusuran saya paling banyak dirujuk dalam kepustakaan autoetnografi, merumuskan tiga pertanyaan untuk menilai penting atau tidaknya tulisan autoetnografi: “Apakah penulis bisa membuat klaim atas apa yang dituliskannya? Apakah peneliti sendiri memperoleh pengetahuan baru? Dan apakah penelitian ini membantu orang lain berhadapan dengan atau memahami dunia mereka?” (dikutip dalam Wall 2006: 10). Pertanyaan pertama bisa saya jawab dengan mudah. Kajian kasus ini berasal dari pengalaman pribadi pelaku sekaligus penulis. Posisi saya cukup unik. Oleh organisasi (Sekolah Rakyat Petani [SRP] Payo-Payo), saya disertai tugas untuk merancang PPD; dan oleh situasi tertentu yang akan saya jelaskan di bawah, saya menjadi satu-satunya orang yang merancang PPD, kemudian memfasilitasinya bersama guru dan pengorganisir berpengalaman, Roem Topatimasang.

Jawaban dari pertanyaan kedua akan tampak dengan sendirinya sepanjang bagian-bagian berikut tulisan ini. Saya akan menjejaki elemen-elemen penting yang turut memberi andil dalam menempa bentuk rancangan pelatihan ini dan bagaimana reaksi para peserta terhadapnya. Karena posisi yang unik tadi, saya bukan hanya belajar sesuatu dari tindakan menuliskan karya ini, melainkan juga butuh menyampaikan suara dan mengungkap pengetahuan-pengetahuan terpendam mengenai rancangan program ini, terutama pengetahuan yang berasal dari saya sendiri. Situasi menempatkan saya pada posisi bahwa tidak ada orang lain yang bisa menuliskannya seintim saya. Tetapi, bersamaan dengan itu, saya sadar sepenuhnya bahwa karya ini bukanlah catatan dan analisis lengkap mengenai kasus ini. Ini hanya “suara” dari salah satu pihak yang terlibat. Seperti dituliskan Purwanto (2011: 177), “(...) kebenaran dalam ilmu-ilmu sosial hanya kebenaran sebagian saja. (...) kebenaran dalam etnografi yang sifatnya parsial.”

Sementara itu, pertanyaan ketiga sebenarnya hanya bisa dijawab oleh pembaca. Saya cuma berusaha sebisa mungkin agar pengalaman pribadi ini dapat dipahami. Menurut Ellis *et al.* (2011), autoetnografi dinilai dari apa yang dapat dilakukan oleh teks itu sendiri dan bukan berdasarkan ukuran-ukuran saintifik tradisional. Generalisasi dalam autoetnografi bukan ditentukan dari seberapa besar sampel responden, melainkan dari seberapa mampu teks tersebut dicerp oleh dan bermanfaat bagi pembaca. Dengan begitu, pembacalah yang menilai apakah cerita ini bisa berdialog dengan pengalaman mereka atau pengalaman orang lain yang mereka kenal. Pembaca menentukan validitas dengan membandingkan antara pengalamannya dan pengalaman yang dituliskan, “(...) dengan memikirkan kesamaan dan perbedaannya dan mengapa demikian, dan dengan merasakan apakah cerita ini memberi wawasan baru kepadanya” (Ellis *et al.* 2011: 282). Di sini saya memberi konteks lebih luas dari elemen-elemen yang membentuk rancangan program dan reaksi para peserta terhadap rancangan tersebut. Dengan begitu, saya meletakkan catatan pribadi ini dalam konteks sosial tertentu yang juga dialami oleh banyak orang lain, bukan catatan terisolasi yang hanya dapat dipahami atau bermanfaat bagi penulis.

Bagaimana PPD Berlangsung

Sampai di sini, pembaca mungkin sudah bertanya-tanya bagaimana bentuk PPD itu sebenarnya. Ini penjelasan ringkasnya. PPD dirancang sebagai riset aksi partisipatoris (*participatory action research* [PAR]), salah satu model penelitian yang menggabungkan riset aksi dan

metode partisipatoris dalam suatu penelitian. Artinya, para peserta diharapkan berusaha mengarahkan penelitian secara partisipatoris untuk menghasilkan serangkaian tindakan. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada kegiatan meneliti dan memahami situasi desa, tetapi juga melibatkan tindakan kolektif warga untuk mengubah keadaan.

Dalam PAR yang ideal, arah penelitian ditentukan melalui diskusi bersama warga desa sampai mereka dapat menyetujuinya. Proses pengumpulan data bisa menggunakan alat-alat dari metode penelitian konvensional, tetapi dilakukan untuk mencari informasi yang telah didiskusikan bersama warga dan harus dilakukan bersama dengan mereka. Karena itu, para peserta didorong untuk berusaha mengajak warga setempat, subjek penelitian, agar bersedia menjalankan atau bahkan mendukung penuh penelitian. Tingkat keketatan penelitian yang dimaksud bisa sangat beragam, bergantung pada ketersediaan orang (warga, fasilitator, dan tenaga pendukung) dan sumberdaya lain (dana dan waktu).⁶ Tetapi, model penelitian tersebut merupakan hasil diskusi bersama warga, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia berikut pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dijawab atau isu prioritas apa yang hendak dihadapi. Singkatnya, keterlibatan warga dibutuhkan dalam setiap tahap, mulai dari penentuan apa yang akan diteliti, bagaimana pengumpulan data dan analisis dijalankan, serta bagaimana hasilnya akan digunakan. Karena itulah, penelitian semacam ini juga mensyaratkan pengorganisasian.

Program pelatihan ini berlangsung dalam tiga tahap. Tahap *pertama* berupa orientasi: mengenalkan dan mendiskusikan PAR serta membahas beberapa contoh kasus PAR yang pernah dilakukan oleh organisasi-organisasi jaringan INSIST di berbagai lokasi. Tahap ini melibatkan diskusi, presentasi peserta, lokakarya, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion* [FGD]), dan simulasi. Roem Topatimasang, guru pengorganisasian rakyat dengan bekal pengalaman sepanjang tiga dekade, mengurai contoh penggunaan PAR di sejumlah kerja pengorganisasian rakyat. Diskusi tentang pengorganisasian di Pacitan, Jawa Timur, misalnya, diangkat dengan terlebih dahulu dijelaskan secara detail persoalan yang dihadapi warga desa setempat. "Saat awal kami datang, yang banyak terdengar, orang-orang menyumpahi Tuhan karena begitu sulitnya kondisi penghidupan mereka," demikian Roem membuka penjelasan tentang desa yang tengah mengalami masalah kekurangan air yang akut. Pengorganisasian di sana berlangsung sekitar dua tahun dengan memanfaatkan berbagai metode PAR. Singkat cerita, desa tersebut berhasil melakukan tindakan-tindakan konservasi air demi meningkatkan pendapatan dari kegiatan bertani. Lewat contoh semacam inilah, para peserta mempelajari definisi, asas-asas dasar, dan metode-metode PAR.

6. Sebagai contoh, di sejumlah desa tempat jaringan INSIST bekerja, para pengorganisir melakukan survei yang menasar populasi desa demi membangun pangkalan data statistik (milik) desa. Mereka mempunyai waktu, orang-orang yang berkomitmen menjalankannya dalam waktu yang relatif panjang, dana (sebagian atau seluruhnya dari pemerintah desa), dan tenaga pendamping yang membimbing mereka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan desa. Misalnya, di satu desa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, data survei menunjukkan bahwa satu dari tiga dusun di sana hanya mengeluarkan nisbi sedikit uang (sekitar Rp500 ribu rupiah per bulan) untuk belanja sayur dibandingkan dengan dua dusun lain (di atas Rp1 juta). Data ini dijadikan dasar oleh pemerintah desa untuk mengadakan program diseminasi penanaman sayur dengan memanfaatkan pekarangan di kedua dusun tersebut.

Pada bagian lain tahap orientasi, para peserta diperkenalkan dengan metode etnografi sebagai salah satu alat PAR untuk mengenali desa secara mendalam. Penelitian etnografis, yang pada banyak bagian mengandalkan pengamatan partisipatoris, sangat efektif dalam menemukan isu-isu penting yang tengah dihadapi warga desa. Isu-isu semacam ini kadang tersembunyi dan sulit dilacak lewat bincang-bincang dalam situasi formal atau kunjungan singkat. Para peserta juga membahas sejumlah isu perdesaan seperti persoalan agraria dan model pembangunan desa, perspektif kritis dalam melihat situasi desa, dan letak pengorganisasian dalam kerja penelitian ala PAR. Bagian ini dimaksudkan untuk membekali para peserta agar melihat langsung ke jantung persoalan yang dialami banyak perdesaan di Indonesia, yaitu kemelut agraria. Secara ontologis mereka dituntun untuk melihat soal-soal agraria yang tidak hanya tentang tanah, tetapi juga semua yang terkait dengan tanah dan apa yang dilakukan di atas dan di bawah permukaannya. Para peserta juga diajak untuk melihat bagaimana pembangunan perdesaan selama ini mengabaikan persoalan besar berupa tergerusnya ruang hidup petani oleh berbagai jenis kekuatan.⁷ Tahap ini diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut. Dengan begitu, pada tahap orientasi, para peserta sudah bisa membayangkan apa yang akan dilakukan di desa dan bagaimana mereka akan memulai melakukannya.

Tahap *kedua* merupakan penerapan beberapa metode PAR, dengan target utama belajar menemukan isu-isu penting dan sejarah pengorganisasian di dua desa penelitian. Peserta dibagi menjadi dua tim untuk bekerja di dua desa berbeda di Sulawesi Selatan. Agar merasakan langsung kehidupan perdesaan dari sumber utama, semua peserta tinggal (*live-in*) di rumah induk semang masing-masing selama tiga minggu.⁸ Pada dasarnya tahap ini dibagi menjadi dua bagian. Pada paruh *pertama* tahap ini, para peserta diajak untuk menerapkan transek desa dan pengamatan etnografis, FGD, dan wawancara. Mereka berlatih menemukan isu utama yang dirasakan bersama oleh banyak warga desa, isu yang memengaruhi kehidupan warga secara signifikan.

Akhir paruh *pertama* tahap ini ditandai dengan semiloka yang menyajikan dan mendiskusikan temuan-temuan sementara kedua tim mengenai “isu-isu besar” di desa masing-masing. Dua hari penuh setiap tim memaparkan temuan masing-masing. Pada kesempatan ini, mereka juga mengevaluasi metode dan batas-batas pengetahuan mereka tentang desa. Pada hari terakhir, para peserta menyusun rencana tindak lanjut sebelum kembali bekerja untuk meneliti kerja-kerja pengorganisasian SRP Payo-Payo.

Pada sepanjang paruh *kedua* tahap ini, mereka meneliti bagaimana SRP Payo-Payo menjalankan kerja-kerja pengorganisasian di dua desa

7. Dipandu oleh Noer Fauzi Rachman, para peserta diajak berkenalan dengan program yang mengancam kedaulatan atas ruang hidup warga perdesaan seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

8. Dua desa itu merupakan wilayah kerja pengorganisasian SRP Payo-Payo. Setiap tim didampingi oleh seorang fasilitator dan tim pendukung dari SRP Payo-Payo.

penelitian. Mereka mewawancarai warga setempat, juga fasilitator dan pengurus SRP Payo-Payo, untuk merekonstruksi cara SRP Payo-Payo bekerja di kedua desa dalam tujuh tahun terakhir. Dari rangkaian wawancara itu, mereka belajar tentang sejarah pengorganisasian SRP Payo-Payo berikut keberhasilan dan kegagalannya. Mereka kemudian menyarikan sejumlah faktor kunci dan prasyarat yang berperan dalam keberhasilan dan kegagalan pengorganisasian.

Dua pekan kemudian, seluruh peserta berkumpul lagi untuk semiloka kedua. Mereka membahas alternatif praktik pembangunan desa (yaitu lewat pengorganisasian) yang dilakukan oleh SRP Payo-Payo di dua desa yang telah mereka tinggali. Analisis terhadap kerja pengorganisasian itu dibuat berdasarkan asas-asas pengorganisasian yang disusun oleh Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang (2003). Selain itu, mereka juga merefleksikan dan mengevaluasi metode-metode yang telah mereka terapkan, lalu membuat rencana tindak lanjut untuk tahap selanjutnya. Pada tahap ini, peserta menulis laporan hasil kerja lapangan.

Tahap *ketiga* merupakan praktik atas keseluruhan pelajaran yang sebelumnya diperoleh para peserta. Pada tahap ini, mereka dibagi menjadi tiga tim, masing-masing tinggal di satu desa yang belum pernah menjadi bagian dari program pengorganisasian SRP Payo-Payo, meski telah menjadi lokasi kerja SRP Payo-Payo untuk program lain.⁹ Selama tahap ini, para peserta hanya mendapatkan pendampingan minimal dari fasilitator. Itu dilakukan agar mereka dapat menimba sebanyak mungkin pengetahuan dari pengalaman sendiri menjalankan riset aksi partisipatoris.

Kegiatan terakhir pelatihan berlangsung di lokasi program dimulai, Malino. Setelah nyaris tiga bulan, dua belas dari dua puluh satu peserta yang masih bertahan mengikuti lokakarya penulisan laporan berikut sesi refleksi dan evaluasi program.

Bagaimana Rancangan PPD Terbentuk

Bekerja seorang diri, untuk bisa merancang program seperti yang saya ceritakan di atas, saya memanfaatkan ingatan akan berbagai program dan bacaan yang saya cerap setidaknya selama lima belas tahun terakhir. Saya dipandu oleh bacaan-bacaan atas berbagai isu kontemporer perdesaan di satu sisi dan kemampuan organisasi di sisi lain untuk menentukan arah dan pendekatan program.

Aneh, Desa Sonder Peneliti

Seorang mantan kepala desa mengeluh, warga di desanya bermasalah dengan pohon pinus. Tadinya pinus hanya ditanam di beberapa

9. Tahap ini dilaksanakan di Kompang, Gantarang, dan Gunung Perak. Ketiga desa tersebut berada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

titik kecil di dalam kawasan hutan lindung, tetapi kemudian pohon ekspansif itu merambah ke luar kawasan hutan dan menutupi sekitar sepertiga wilayah desa. Seiring meluasnya kawasan hutan pinus, krisis air pun terjadi. Dia melanjutkan, pemerintah desa tidak dapat membawa masalah tersebut kepada pemerintah kabupaten karena tidak adanya “data ilmiah” untuk mendukung argumen warga bahwa ekspansi alamiah hutan pinus menyebabkan mampetnya banyak mata air. Ini terjadi pada 2012. Sejak itu, saya mulai bertanya-tanya, mengapa desa tidak *mempunyai* peneliti sendiri yang khusus bekerja untuk mereka?

Merefleksikan kejadian ini, saya lanjut bertanya, berapa banyak peneliti dari perguruan tinggi yang mengabdikan penelitian mereka untuk menggeledah desa sesuai permintaan atau dari perspektif orang desa? Pemerintah supradesa pun demikian. Sumberdaya yang dimiliki memungkinkan mereka untuk menugaskan peneliti dengan tujuan serupa. Tetapi, berapa sih penelitian yang diselenggarakan khusus dan hanya untuk kepentingan warga desa? Kalangan swasta pun tidak jauh berbeda. Seluruh pihak itu lebih banyak meneliti dengan membawa agenda masing-masing. Kelak kegundahan ini menemukan sebagian jawabannya selama PPD berlangsung. Di semua lokasi PPD, belum pernah ditemukan dokumen hasil penelitian yang disimpan di desa atau setidaknya didiskusikan dengan warga secara kolektif untuk menjadi dasar dalam penentuan kegiatan atau pengambilan kebijakan desa, apalagi penelitian yang mengajak warga meneliti. Seorang kepala desa di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, misalnya, mengeluhkan bagaimana program beras untuk rakyat miskin (RASKIN) selalu tidak tepat sasaran. Mereka sendiri tidak tahu dari mana data tentang target program itu berasal. Mereka cuma menerima daftar nama keluarga penerima RASKIN, yang selalu menjadi bahan debat dan rumor di kalangan warga desa karena ada orang yang dianggap berhak tapi tidak masuk dalam daftar atau sebaliknya. Data dan analisis yang menghasilkan nama-nama penerima bantuan tersebut tidak pernah ada di desa.¹⁰ Hal ini saya jumpai di hampir seluruh desa yang pernah saya kunjungi.

Gagasan ini dipertajam oleh situasi kontras yang saya alami dan saksikan di SRP Payo-Payo. Dalam kerja-kerjanya, SRP Payo-Payo senantiasa menyertakan penelitian yang memang dimaksudkan untuk digunakan oleh warga desa, baik penelitian yang dilakukan bersama maupun hanya oleh SRP Payo-Payo atas permintaan atau saran warga desa. Apabila proses pengorganisasian belum berjalan secara memadai, SRP Payo-Payo berinisiatif mengerjakan penelitian *untuk* warga desa, lalu menyajikan laporan dalam sebuah “seminar” bersama mereka. Di satu desa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, misalnya, kami melakukan penelitian tentang mata pencaharian warga

10. Data yang digunakan untuk program ini dihimpun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) untuk Perlindungan Sosial (wawancara Ishak Salim, pegiat SRP Payo-Payo, pada 30 Agustus 2016). Untuk informasi lengkap BDT, lihat <https://bdt.tnp2k.go.id/>.

atas saran warga yang mengaku mengalami krisis karena susutnya produktivitas kakao. Hasilnya kemudian disajikan dan didiskusikan bersama warga dan perangkat desa. Kami menyatakan bahwa kakao sebagai penghasilan utama sudah sulit dipertahankan dan mereka harus memperhatikan beberapa alternatif potensial yang mulai dikembangkan secara terbatas oleh beberapa warga.

Desa sangat butuh kader pembangun desa (dari dalam dan dari luar desa) yang benar-benar bekerja untuk kepentingan warga desa. Perguruan tinggi atau sekolah tidak dapat dikatakan mengarahkan jebolan mereka untuk mengabdikan kepada masyarakat perdesaan. Sekolah-sekolah malah mengajarkan “ilmu pergi” bagi generasi muda petani: ilmu untuk mendapatkan pekerjaan selain bertani, untuk bertahan hidup di kota sebagai pekerja kantoran. Kegagalan perguruan tinggi dapat dilihat antara lain dari kecenderungan pembangunan pertanian yang lebih mengarah pada peningkatan produktivitas (untuk pasar yang dikendalikan dari kota dan demi menekan harga produk pertanian untuk menenangkan konsumen kota) ketimbang pada kesejahteraan para petani desa atau keberlanjutan kehidupan mereka dengan tanah.

Pemerintah memang mengadakan pelatihan-pelatihan untuk petugas penyuluh lapangan (PPL), tetapi sulit untuk mengatakan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan desa. Cerita dan kesaksian tentang penyuluh yang lebih bertindak sebagai petugas promosi bibit atau input kimia buatan pabrik sudah menjadi rutinitas. Demikian pula cerita tentang ketidakmampuan mereka membantu mengatasi masalah yang muncul bersamaan dengan datangnya input dari luar yang dibawa ke desa. Beberapa peserta PPD berkesempatan menyaksikan langsung aktivitas PPL di desa yang “menawarkan” program dan memberikan sedikit kesempatan bagi warga untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Mereka hanya mencatat suara warga di balik lembar kalender milik tuan rumah tempat pertemuan dan tidak membawa catatan itu pulang.

Bagaimana dengan organisasi nonpemerintah? Bila dibandingkan dengan tahun-tahun menjelang dan tak lama setelah 1998, organisasi-organisasi masyarakat sipil (dengan beberapa pengecualian) juga cenderung meninggalkan pengorganisasian rakyat desa yang mutlak membutuhkan riset. Pada masa-masa awal saya aktif bekerja di desa, masih cukup banyak organisasi yang bekerja di desa. Ketika bertemu para pegiat itu di kota, saya sering mendengar kata “pendampingan” dan “desa dampingan”. Dalam kesempatan berkumpul secara informal, dengan senang hati mereka bercerita tentang apa saja yang telah dilakukan dan dicapai di desa-desa dampingan. Fenomena semacam ini semakin jarang saya jumpai sejak pertengahan 2000-an. Kebanya-

kan organisasi nonpemerintah bekerja di kota, terutama untuk kerja advokasi (pada aras legal/regulasi), dan sangat jarang melibatkan elemen pengorganisasian di dalamnya. Bahkan, banyak organisasi nonpemerintah yang saya kenal itu kini telah bubar, sebagian besar karena tidak mempunyai dana untuk melanjutkan kegiatan atau para pegiatnya telah pergi mencari pekerjaan lain. Ini mengisyaratkan tingginya tingkat *turnover* pegiat organisasi nonpemerintah, setidaknya di Sulawesi Selatan. Ketiadaan pegiat yang bisa saya ajak untuk duduk bersama merancang PPD juga terjadi karena seluruh pegiat SRP Payo-Payo telah terserap dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Krisis pegiat semacam ini tidak hanya terjadi pada SRP Payo-Payo atau di Sulawesi Selatan, tetapi juga pada banyak organisasi serupa yang saya kenal di seluruh Indonesia. Pengecualian mungkin bisa tampak—setidaknya oleh saya—di kota-kota besar di Jawa, terutama Jakarta (boleh jadi karena uang banyak beredar di sana) dan Yogyakarta (mungkin karena biaya hidup yang cukup murah).

Bila pegiat saja sudah kurang, apalagi pegiat yang mempunyai kemampuan spesifik untuk melakukan penelitian di desa? Inilah yang mendorong saya untuk meletakkan elemen penelitian desa dalam rancangan PPD. Tetapi, melatih orang meneliti di desa sudah jamak dilakukan banyak lembaga. Terlebih lagi, desa sebenarnya membutuhkan lebih dari sekadar peneliti yang hanya melakukan penelitian konvensional di desa.

Tetapi, Penelitian Seperti Apa?

Sebuah program pembangunan desa akan berakhir pada 2000.¹¹ Bersama seorang kawan, saya menerjemahkan puluhan naskah modul dan buku panduan pelatihan fasilitator desa yang digunakan selama program berjangka lima tahun itu berlangsung. Saya mempelajari teori dasar serta metode fasilitasi dan pendidikan orang dewasa dari naskah-naskah yang saya terjemahkan dan rujukan yang saya butuhkan untuk menerjemahkan naskah-naskah itu.¹²

Ketika kantor kontrakan dikosongkan setelah program berakhir, perpustakaan kecil kami mendapat hibah beberapa kantong buku. Di antara buku-buku itu, ada karya Robert Chambers yang mengulas *participatory rural appraisal* (PRA) serta buku-buku dan jurnal terbitan Institute of Development Studies (IDS) yang membahas *participatory learning action* (PLA). Bersama beberapa kawan yang kelak menjadi bagian dari SRP Payo-Payo, saya membaca buku-buku itu lalu melakukan eksperimen-eksperimen terbatas. Dari sana kami belajar bahwa penelitian bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan mengajak warga setempat untuk melakukan kajian tentang kampung mereka

11. Decentralised Livestock Services in Eastern Indonesia (DELIVERI), program pembangunan desa dalam bidang peternakan yang didanai oleh Department for International Development (DFID) Inggris.

12. Ada naskah yang disusun oleh Mansour Fakhid dan Russ Dilts, dua sosok penting pembentukan INSIST.

sendiri. Kami juga menyadari bahwa peran utama *peneliti* bukanlah *pencari data*, melainkan *fasilitator* yang memuluskan berjalannya proses penelitian oleh warga sendiri. Untuk itu, seorang peneliti harus mempunyai keterampilan melakukan fasilitasi. Ini benar-benar sesuatu yang baru bagi kami, membuka mata kami bahwa penelitian juga dapat dilakukan oleh warga desa dengan lebih menyenangkan (kami membayangkan menyusun kalender musim dengan menggunakan ranting kayu untuk menulis di atas tanah). Karena kami belum mempunyai pengalaman, kami hanya sering berlatih memfasilitasi proses penggalian pengalaman dengan kawan-kawan sendiri sebagai “kelinci percobaan”.

Kepustakaan baru ini juga mengakrabkan saya dengan beberapa aspek dalam kajian pembangunan internasional yang kemudian memudahkan saya memilih jurusan ketika berniat melanjutkan studi master. Saya mendalami isu-isu pembangunan desa di International Institute of Social Studies (ISS), Den Haag, Belanda, dalam jurusan Rural Livelihoods and Global Change.¹³ Di sana saya belajar mengenali desa dari perspektif marxian. Diampu para begawan kajian agraria kritis (*critical agrarian studies*) seperti Saturnino (“Jun”) M. Borrás Jr., Cristóbal Kay, dan Bridget O’Laughlin, kami mempelajari antara lain isu-isu dan gerakan agraria di berbagai negara serta posisi analisis gender dalam kajian agraria. Saya pun mulai mengenali teori-teori dan metodologi yang terhimpun dalam pendekatan penghidupan (*livelihoods approach*) sebagaimana dikembangkan antara lain oleh Robert Chambers dan Ian Scoones.¹⁴ Saya mengadopsi sebagian dari kedua pendekatan ini—kajian agraria dan pendekatan penghidupan—dalam rancangan PPD. Pada tahap kedua dan ketiga PPD, para peserta berada di desa untuk mengumpulkan data dengan dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dari kedua perspektif tersebut.

Didorong oleh pengalaman kerja dan berbagai literatur sebelumnya, saya pun mengambil mata kuliah Participatory and Action Research ketimbang mata kuliah “metodologi” yang lain dengan harapan bisa memanfaatkannya dalam kerja-kerja di desa sepulang ke Indonesia. Kelak ini jadi kenyataan. Di kelas ini, saya belajar tentang watak konstruktivis penelitian jenis ini, tentang keharusan mendengar baik-baik pendapat dan pengalaman warga desa, bukan hanya suara para “pakar” (dan sensitivitas bahwa “suara warga desa” tidaklah seragam). Mereka juga mempunyai kepentingan dengan membawa fokus, pertanyaan, dan metode sendiri yang belum tentu sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi warga setempat. Saya belajar betapa penelitian semacam ini adalah *tindakan politis*. Data dan analisis yang diperoleh bisa digunakan oleh warga untuk mengambil tindakan guna

13. Beberapa tahun setelah saya menyelesaikan studi, jurusan ini berganti nama menjadi Agrarian, Food and Environmental Studies. ISS kini menjadi bagian dari Erasmus University Rotterdam.

14. Untuk sejarah perkembangan pendekatan penghidupan, simak Scoones (2015).

memperjuangkan kepentingan mereka, sehingga dapat mengganggu keamanan pemegang kuasa.

Selain dari bacaan, saya menjadi akrab dengan PAR melalui program-program yang dikerjakan organisasi-organisasi yang saya kenal maupun tempat saya tergabung. Meski sebagian besar program itu tidak menyebutkan secara langsung penggunaan PAR, mereka menjalankannya di beberapa bagian. Sebuah program pengorganisasian di beberapa desa di Sulawesi menyelenggarakan serangkaian diskusi dan kajian awal bersama warga, sebelum menemukan isu bersama dan menyusun agenda untuk menghadapi isu tersebut. Satu contoh: setelah mendiskusikan persoalan krisis air yang melanda desa, sekelompok kecil warga diajak mempelajari berapa luas lahan sawah (dan berapa jumlah petani terdampak) di satu hamparan yang didera kekurangan air di musim kemarau, dari mana air bisa diperoleh berikut jaraknya dari sumber air, serta bagaimana membangun saluran dan berapa ongkosnya. Ini proses riset panjang. Setelah semua data diperoleh, barulah mereka bekerja mengajak lebih banyak warga terdampak untuk menyusun agenda kerja dalam bentuk pembangunan irigasi (Batiran 2011). Kerja ini membuktikan kemanjuran metode PAR dalam pengorganisasian masyarakat desa, yang bukan hanya berhasil mendirikan saluran air dan meningkatkan produktivitas lahan, melainkan juga dapat membangun pranata baru tempat petani dapat secara teratur berjumpa mendiskusikan isu bersama dan menyusun agenda-agenda baru untuk menghadapinya.

Di masa-masa awal saya tertarik pada isu-isu perdesaan, beragam metode partisipatoris dikembangkan dalam program-program pembangunan desa. Saat itu pendekatan partisipatoris sangat banyak dikampanyekan lewat berbagai jenis pelatihan, baik pelatihan kader organisasi maupun pelatihan yang dihadiri warga desa sendiri. Kelak saya tahu bahwa saat itu pendekatan partisipatoris telah menjadi “tirani baru”, dalam arti lembaga-lembaga dana internasional mewajibkan secara semesta agar program-program yang bekerja di akar rumput menggunakan metode partisipatoris. Dengan kata lain, mereka memaksakan pemakaian pendekatan ini meski situasi di lapangan sangat beragam (Cooke dan Kothari 2000). Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pendekatan partisipatoris tetap menyimpan potensi transformatif bila dijalankan dengan sensitivitas terhadap politik lokal (Hickey dan Mohan 2004).

Seluruh pengalaman, kesaksian, dan bacaan di atas membentuk latar belakang pemahaman saya ketika meletakkan PAR dalam rancangan awal PPD. Tetapi, saya paham bahwa PAR tidak bisa berdiri sendiri. Saya masih harus menempatkan aspek pengorganisasian dalam kerja-kerja pembangunan desa di dalam pelatihan ini.

Pembangunan Desa dan Masalahnya

Berangkat dari bacaan, pengalaman, kesaksian, dan penelitian-penelitian kecil yang melibatkan saya (antara lain terdokumentasi dalam Sirimorok 2015a; Sirimorok dan Hawi 2015; INSIST 2014), saya dapat membuat klaim sementara bahwa salah satu masalah penting yang melatari kegagalan pembangunan desa adalah susutnya partisipasi warga secara kolektif dalam proses pengambilan keputusan publik. Setidaknya sejak masa pemerintahan Soeharto, suara warga sangat jarang didengar dalam proses pengambilan keputusan publik, baik di tingkat kabupaten maupun nasional. Desa tidak mempunyai kedaulatan mengatur urusan sendiri, terutama seputar aspek ekonomi dan politik. Meski sudah dibuka peluang melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG), pada kenyataannya nyaris tidak ada aspirasi warga desa yang kemudian terwujud dalam proses pembangunan. Di Nusa Tenggara Barat, seorang tetua desa menyampaikan kepada saya bahwa dia trauma terhadap pertemuan di balai kampung karena tidak satu pun usulan warga yang pernah menjadi kenyataan sejak pertemuan-pertemuan itu (MUSRENBANG) diadakan.

Setelah berlangsung selama empat dekade lebih, model pembangunan seperti ini membuat warga dan pemerintah desa tidak terbiasa melakukan perencanaan sendiri dengan cara meminta pendapat dari seluruh warga. Kondisi ini kadang membuat frustrasi, termasuk ketika mendengar keluhan kawan-kawan tentang begitu sulitnya mengajak warga berkumpul membicarakan persoalan mereka sendiri, bukan untuk mengerjakan proyek. Soal ini jadi lebih memusingkan ketika saya mengingat kembali bacaan-bacaan mengenai situasi desa dalam kerangka nasional: desa semakin dimiskinkan, terutama karena struktur penguasaan tanah yang timpang, dengan 21 juta hektare lahan pertanian harus diperebutkan oleh 24 juta keluarga tani (Bachriadi dan Wiradi 2011: 16). Sempitnya lahan pertanian rakyat kemudian berdampak pada melambungnya harga lahan pertanian, terutama lahan beririgasi yang mencapai kisaran Rp100–500 juta per hektare (Akatiga dan White 2015). Belum lagi nilai jual produk pertanian yang tidak sebanding dengan harga barang dan jasa yang harus dibeli petani (*terms of trade* yang timpang). Buktinya, Nilai Tukar Petani (NTP) terus berada di titik marginal.¹⁵ Hasilnya jelas, angka kemiskinan di desa (berkisar 13,4%), jauh lebih tinggi dibanding di perkotaan (7,2%)¹⁶, yang memaksa susutnya jumlah keluarga tani, yakni sebanyak setengah juta setiap tahun menurut Sensus Pertanian 2013.

Kembali ke partisipasi warga desa dalam pengambilan keputusan publik, salah satu dampak pentingnya ialah berkembangnya

15. "Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Pertanian (NTUP) Menurut Periode Bulan, Januari 2008–November 2013 (2007=100) dan Desember 2013–Desember 2016 (2012=100)", Badan Pusat Statistik, pemu-takhiran terakhir pada 23 November 2017, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/10/09/1481/indeks-harga-yang-diterima-petani-it-indeks-harga-yang-dibayar-petani-ib-nilai-tukar-petani-ntp-dan-nilai-tukar-usaha-pertanian-ntup-menurut-periode-bulan-2008-2016.html>.

16. "Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970–2017, Badan Pusat Statistik, pemu-takhiran pada Oktober 2017, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.

penguasaan para elite (*elite capture*). Apa yang disebut sebagai “suara warga desa” menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima begitu saja. Program-program pembangunan yang diusulkan dari desa sering merupakan perwujudan dari suara segelintir elite desa, kelompok warga yang menguasai proses pengambilan keputusan publik di desa. Mekanisme seperti ini merupakan pandangan umum yang dapat kita lihat di banyak desa. Saya menyaksikan fenomena ini di banyak desa yang pernah saya kunjungi. Di salah satu desa di Sulawesi Selatan, seorang kepala desa menyatakan bahwa “MUSRENBANG lewat telepon” lebih mujarab. Ini pernyataan yang mengisyaratkan pentingnya kedekatan dengan pejabat pemerintah guna meluluskan usulan program di tingkat kabupaten. Di beberapa provinsi, beberapa organisasi anggota jaringan INSIST mengadakan pelatihan agar warga desa sanggup membangun Sistem Informasi Desa: mengumpulkan data dan menyusun pangkalan data untuk kepentingan pembuatan kebijakan. Saya terlibat dan menyaksikan kerja semacam ini di beberapa desa di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Saya menemukan betapa gagasan bahwa mereka kini harus dan mempunyai wewenang untuk membuat perencanaan pembangunan berbasis data merupakan sesuatu yang betul-betul baru.

Setidaknya sejak tujuh tahun terakhir, saya mengamati persoalan ini di sebagian lokasi kerja anggota jaringan INSIST. Kesimpulan sementara saya: ada beberapa alasan yang menyebabkan partisipasi warga di ruang keputusan publik masih butuh diusahakan secara serius. *Pertama*, banyak kelompok warga di desa yang tidak terorganisir dengan baik, yang tampak dari alpanya kebiasaan untuk bersengaja mengajak warga secara luas duduk bersama membicarakan pengambilan keputusan publik. Forum-forum MUSRENBANG yang diharapkan dapat mengubah kecenderungan ini malah memperdalam kesangsian warga akan efektivitas pengorganisasian aspirasi warga desa dalam pengambilan kebijakan publik (berulang kali mendapati usulan mereka tidak terwujud). Di sebagian desa, suara kaum marginal desa (mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan desa) jarang terdengar, bahkan suara desa secara keseluruhan pun jarang didengar kecuali lewat pranata yang berwatak hierarkis (*patron-klien*).

Di banyak tempat, desa kehilangan kemampuan melakukan kerja kolektif terprogram dan berjangka panjang, terutama untuk urusan ekonomi dan politik (Sirimorok dan Hawi 2015). Hal ini mengindikasikan rendahnya kemampuan desa untuk mengadvokasi kepentingan ekonomi warga dan berpartisipasi secara substansial dan signifikan dalam pembentukan kebijakan yang langsung memengaruhi hidup dan penghidupan warga. Desa-desa telah kehilangan kemampuan mengorganisir diri.

Kedua, pengambilan keputusan publik berbasis penelitian (*evidence-based policy*) nyaris tidak tampak. Kealpaan ini seringkali menyebabkan “program prioritas” desa yang didiskusikan dalam MUSRENBANG, misalnya, tak lain hanyalah daftar keinginan (*wish list*), bukan kebutuhan nyata warga. Sementara itu, survei dan penelitian yang dilakukan di desa selama ini lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan pihak-pihak di luar desa. Penelitian-penelitian itu biasanya “dipesan” atau dijalankan langsung oleh lembaga atau perorangan di luar desa, seringkali bersifat parsial atau sektoral, dan hasilnya jarang diketahui oleh pemerintah desa, apalagi warga desa.

Namun, maraknya konflik agraria di banyak daerah mengisyaratkan bahwa warga desa sudah mulai (terpicu untuk) mengorganisir diri guna menciptakan transformasi sosial, yaitu mengubah ketimpangan kuasa, dengan mengemukakan suara mereka ke hadapan publik dan berhadap-hadapan langsung secara terbuka dengan pihak yang berkuasa. Tetapi, pendapat ini perlu dibatasi. Membandingkan gerakan petani dan kekuatan sosial pendukungnya di India dan Indonesia, Li (2009) menyebutkan bahwa salah satu kelemahan gerakan di Indonesia adalah sifatnya yang terpecah belah. Gerakan rakyat berbasis perdesaan di Indonesia cenderung sulit membentuk program jangka panjang dengan tekanan besar bagi kekuasaan untuk mengubah kebijakan (Li 2009: 85–87). Secara tidak langsung, Li (2009) mengisyaratkan bahwa gerakan sosial perdesaan di Indonesia cenderung bersifat defensif; mereka baru dan hanya muncul setelah ada serangan dari pihak lain, semisal pencaplokan lahan oleh perusahaan raksasa, sehingga dalam banyak kasus sulit memenangkan pertarungan karena telah kalah langkah. Pendapat ini sejalan dengan temuan kami di beberapa desa di Sulawesi Selatan, yang menunjukkan bahwa warga lebih bisa mengorganisir diri melakukan kerja kolektif untuk kegiatan-kegiatan insidental ketimbang untuk kegiatan-kegiatan yang terprogram dan berjangka panjang (Sirimorok dan Hawi 2015). Menurut Tan dan Topatimasang (2003), salah satu penyebab terjadinya hal itu adalah ketiadaan kerja pengorganisasian jangka panjang yang mempunyai efek signifikan dan berkesinambungan.

Dari pengalaman SRP Payo-Payo di Sulawesi, kerja pengorganisasian memang mutlak membutuhkan waktu jangka panjang, dengan seorang pengorganisir yang harus tahan bekerja sampai beberapa tahun di desa yang sama. Ini membutuhkan komitmen dan dukungan organisasi. Pengorganisasian adalah kerja mengubah kebiasaan lama dan membentuk pranata baru agar desa dapat menjadi tempat bagi warga untuk membicarakan isu-isu bersama, membuat agenda bagaimana cara mengatasinya, lalu mengerjakannya, sebelum kemudian dievaluasi dan dilakukan lagi dengan perbaikan, demikian

seterusnya. Karena itu, pengorganisasian menjadi bagian sangat penting dalam rancangan PPD. Dengan menguatnya pranata baru lewat pengorganisasian, kekuasaan lama akan terganggu dan terjadilah konflik perebutan kuasa, yang bila dikelola dengan baik akan berakhir pada perubahan perimbangan kekuasaan di desa (bandingkan dengan Schutz dan Sandy 2011).

Mengapa Orang Muda?

Di poster pengumuman pendaftaran PPD, kami menetapkan calon peserta adalah mahasiswa dan lulusan baru (*fresh graduate*), selain aktivis organisasi nonpemerintah. Ini mengisyaratkan, meski secara luwes, batas usia peserta. Mengapa kami mengutamakan orang muda untuk ikut dalam program ini?

Jawaban dari pertanyaan ini saya lihat dari dua sisi, yakni dari sisi peserta sebagai (calon) kader yang akan bekerja di desa dan dari sisi desa itu sendiri. Dari sisi peserta, saya dan sebagian kawan-kawan di SRP Payo-Payo mempunyai pengalaman cukup panjang mengadakan berbagai jenis pelatihan bagi orang yang (akan) bekerja di desa. Setidaknya sejak lima belas tahun lalu, kami menggelar pelatihan-pelatihan yang langsung bertempat di lapangan, yaitu di desa. Dari pelatihan-pelatihan ini, kami mendapat banyak pelajaran, salah satunya bahwa orang muda lebih memungkinkan untuk diajak membangun komitmen bekerja di desa. Alasan paling utama adalah mereka lebih leluasa dan belum terikat komitmen jangka panjang dengan pekerjaan maupun keluarga atau keduanya. Karena PPD dimaksudkan untuk menumbuhkan generasi baru pengorganisir rakyat, dan dengan demikian membutuhkan komitmen jangka panjang, persoalan ini sangat penting untuk diperhatikan.

Di luar itu, sejak mengadakan program-program dengan orang muda, saya melihat kebutuhan besar untuk membongkar banyak asumsi keliru yang melingkupi keberadaan orang muda di Indonesia, salah satunya retorika pemuda sebagai “calon pemimpin masa depan”. Gagasan ini sering membuat publik melewatkan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh orang muda, baik dalam pemberdayaan orang muda maupun pemberdayaan masyarakat secara umum. Mereka sering dianggap sebagai pihak yang belum “makan garam”, selalu menimbulkan masalah, dan bukan pembawa solusi. Karena itu, mereka harus “dibina”, sehingga senantiasa diceramahi dan tidak layak didengarkan. Cara pandang ini membuat masyarakat sering melewatkan potensi besar orang muda untuk terlibat secara bermakna dalam proses transformasi sosial. Padahal, keterlibatan orang muda Indonesia sudah tampak bahkan di seputar momentum

17. Meski demikian, masih dibutuhkan lebih banyak kajian yang membahas secara spesifik apa yang dilakukan oleh orang muda di desa-desa pada masa kini. Secara khusus, tidak banyak kajian mengenai gerakan sosial kontemporer yang menelisik keterlibatan orang muda dalam pengorganisasian masyarakat. Sebagian besar kajian terbaru membahas keterlibatan orang muda dalam politik elektoral, khususnya sebagai partisipan muda atau pemilih pemula dalam proses yang secara keseluruhan dirancang dan sebagian besar dijalankan oleh orang dewasa, sering secara culas. Sementara itu, kajian lain lebih membahas situasi sosial yang dialami oleh orang muda di Indonesia (misalnya, Parker dan Nilam 2013).

18. James dan McGillicuddy (2001: 3) memilah tiga perspektif dalam melihat orang muda, berikut tawaran solusi dari setiap perspektif. *Pertama*, perspektif pencegahan, melihat orang muda sebagai bagian dari masyarakat yang kurang memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari bahaya maupun untuk mengambil keputusan yang bijak. Karena itu, masalah orang muda terletak pada "patologi individual" atau budaya keluarga masing-masing, sehingga solusi bagi mereka adalah pendidikan dan penguatan ketangguhan mereka untuk menghadapi lingkungan yang tidak bersahabat. *Kedua*, perspektif pengembangan, menganggap orang muda kurang memiliki akses terhadap dukungan dan peluang, sehingga solusinya adalah pemberian dukungan dan peluang bagi individu pemuda agar dapat mewujudkan potensi terpendam mereka. *Ketiga*, perspektif pemberdayaan.

19. Untuk gambaran lebih terperinci mengenai sejarah perancangan, proses, dan hasil program, lihat Sirimorok (2010a).

perubahan besar yang terjadi di Indonesia, seperti perang revolusi (Anderson 1988) dan reformasi (Aspinall 2005). Hingga kini, mereka banyak terlibat dalam pengorganisasian masyarakat yang berkontribusi pada gerakan sosial. Begitu banyak gerakan dalam beragam jenis dan intensitas, sejak dulu, yang tidak dapat dilepaskan dari kerja orang muda.¹⁷

Karena itu, dibutuhkan cara baru melihat orang muda, yaitu sebagai pihak yang dapat memberi solusi, pelaku aktif, dan aset dalam mengusahakan perubahan dan kemajuan (Little dalam Golombek 2002). Dari perspektif pemberdayaan, kita bisa melihat bahwa persoalan orang muda adalah ketimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan mereka tidak dapat mengakses peluang, sehingga solusinya adalah menciptakan peluang bagi orang muda untuk mengoreksi ketimpangan kekuasaan melalui tindakan kolektif guna mentransformasikan pranata dan sistem di masyarakat agar menjadi lingkungan yang lebih peduli dan suportif (James dan McGillicuddy 2001: 3).¹⁸

Kami menyadari potensi yang tersimpan dalam diri orang muda dan melihat keterlibatan orang muda tidak hanya penting bagi masa depan tetapi juga pada masa sekarang. Setidaknya sejak 2002 bersama kawan-kawan, saya mengembangkan dan menjalankan program-program kerja lapangan untuk orang muda. Salah satu program yang paling komprehensif adalah Youth Camp, program pelatihan penelitian lapangan selama sebelas hari. Program ini melibatkan *live-in* (seorang peserta tinggal di satu rumah) dan penelitian di desa-desa, difasilitasi secara partisipatoris, serta dimulai dengan orientasi dan diakhiri dengan penulisan dan penyajian hasil secara sederhana kepada warga.¹⁹ Pelatihan inilah yang menjadi model dasar PPD. Pada diskusi awal untuk merancang PPD, mandat yang diberikan SRP Payo-Payo kepada saya: "Buat rancangan program seperti Youth Camp, tetapi ini untuk calon pengorganisir muda."

Sebagian besar peserta PPD adalah orang muda yang telah menjalankan kerja-kerja terorganisir, baik di dalam maupun di luar kampus. Mereka mengajar anak-anak pemulung, terlibat dalam gerakan literasi hingga gerakan lingkungan, bergiat dalam pers mahasiswa atau bahkan pengorganisasian masyarakat. Mereka hanya butuh dukungan dan wadah berbagi pengalaman untuk mempertajam kerja-kerja yang telah dilakukan.

Peserta program ini kebanyakan adalah orang kota atau orang yang telah melewati proses urbanisasi. Mereka bersekolah di kota sekian lama (sebagian besar—bila tidak seluruh—universitas berada di kota dan dikelola orang kota), sering sampai mengubah gaya hidup dan cara berpikir. Jadi, model program ini dapat dilihat sebagai pelatihan bagi orang muda urban atau terurbankan untuk (kembali) bekerja di desa.

Di sisi sebaliknya, desa sedang mengalami krisis generasi penerus. Sepertiga (32,76%) petani di Indonesia sudah berusia di atas 54 tahun. Bersamaan dengan itu, tingkat pendidikan petani pun semakin menurun. Sebagian besar, sekitar 72%, tenaga kerja sektor pertanian hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah (Khudori 2016). Saya menyaksikan dan mendengar pula bahwa anak-anak petani yang bersekolah ke kota enggan pulang untuk menjadi petani (di desa sering tidak ada Sekolah Menengah Atas, apalagi perguruan tinggi). Fenomena ini memantik perhatian publik, wacananya beredar lewat media massa dan penelitian ilmiah (Akatiga dan White 2015; *National Geographic Indonesia* 2015).

Bagi orang muda desa, untuk menjalani masa depan sebagai petani, mereka harus berhadapan dengan melambungannya harga lahan pertanian (karena lahan untuk pertanian rakyat—dibandingkan untuk perusahaan besar—terlalu kecil) dan sulitnya mendapatkan pemasukan memadai dari pekerjaan sebagai petani (NTP belum membaik) (Sirimorok 2015a). Bagi mereka yang mungkin dapat menembus halangan itu, masih ada satu persoalan lagi: bias kota sebagai kehidupan ideal sebagaimana tampak di berbagai produk dan pranata budaya, termasuk lembaga pendidikan (Sirimorok 2010a).

Dalam kerangka lebih luas, apa yang dialami orang muda desa tampaknya juga dialami oleh kawan-kawan mereka di kota. Sastra-midjaja dan Naafs (2015) menulis:

Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pendidikan dan lapangan kerja sering memaksa orang muda dan keluarga mereka berjuang sendiri dan berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia. Ketika aspirasi orang muda tentang pekerjaan terganggu oleh prospek yang tidak pasti, kita harus melihat jauh melampaui pengalaman individual untuk mempertanyakan relasi kuasa yang lebih luas serta peran pemerintah dan perusahaan

dalam memfasilitasi jalur orang-orang muda menuju lapangan pekerjaan. Orang muda di Indonesia membutuhkan kebijakan-kebijakan dan infrastruktur yang memadai—ketimbang kampanye-kampanye mewah atau proposal-proposal strategi nasional yang bersifat umum—agar potensi sumberdaya manusia tersebut [orang muda] benar-benar menjadi peluang nyata.

Namun, melihat terus mengalirnya orang-orang muda desa ke kota, tidak membaiknya penyediaan lahan pertanian, dan timpangnya NTP sudah mengisyaratkan bahwa kota masih lebih menawarkan prospek ketimbang desa. Kerja jangka panjang dalam berbagai bentuk untuk mengajak orang muda kembali ke desa mensyaratkan transformasi di desa itu sendiri, dan hal ini harus diusahakan. Penyiapan pengorganisir muda untuk bekerja di desa-desa pun menjadi relevan. Dalam kerangka inilah PPD membawa orang muda kota kembali ke desa.

Menyaksikan Peserta Berubah

Selama masa awal program, tugas harian saya dimulai dengan menunggu. Setiap pagi saya duduk di beranda rumah induk semang dan para peserta bergantian datang membawa berkas tulisan. Kami meminta mereka menulis catatan lapangan (*fieldnote*) untuk diserahkan saban hari. Pada hari-hari pertama, sebagian kecil peserta menyerahkan catatan berupa data—hanya data. Tetapi, lebih banyak lagi peserta yang datang membawa catatan bersifat *log*: daftar kegiatan dan kejadian dengan petunjuk waktu yang disusun secara kronologis, tanpa refleksi atau analisis atas kegiatan dan kejadian tersebut. Malah ada peserta yang menulis catatan lapangan yang lebih mirip diari, lebih banyak mengungkap perasaan. Ketika ditanya mengapa demikian, seorang peserta menjawab, “Bukannya kami diminta menulis *feel note*?”

Saya segera menyadari, ada yang salah dengan instruksi dan saya harus berhati-hati dengan asumsi. Di awal, kami memberikan tugas ini tanpa disertai petunjuk yang ketat. Kami beranggapan mereka sudah bisa melakukannya. Tetapi, mendengar dan menerapkan penjelasan bukanlah hal yang sama. Selama tahap orientasi, satu sesi khusus diadakan untuk menjelaskan cara membuat catatan lapangan etnografis. Meski begitu, pada hari-hari pertama, sebagian besar peserta masih perlu dituntun untuk mengerjakan tugas, bukan hanya terkait catatan lapangan, melainkan juga terkait unsur-unsur lain kerja lapangan, terutama metode-metode dalam kerangka PAR.

Hal serupa terjadi ketika para peserta mencoba memandu FGD. Pertama kali mereka berhasil berdiskusi bersama beberapa perem-

puan, acara yang mereka pandu itu lebih merupakan wawancara berkelompok, dengan satu pertanyaan dijawab secara bergiliran oleh warga. Pada kasus lain, serombongan peserta ditinggalkan sekelompok perempuan bahkan sebelum sempat saling menyapa. Begitu para peserta mendekat, seluruh warga yang tadinya sedang bersantai di *bale-bale* di bawah rumah panggung segera pergi bertebaran, mungkin pulang ke rumah masing-masing. Dalam diskusi reflektif sore harinya, para peserta bercerita bagaimana mereka datang berombongan dengan membawa kertas plano dan alat tulis. Itu membuat warga gugup. “Hanya dua yang mereka takuti: Tuhan dan bahasa Indonesia,” seloroh seorang pria muda, untuk mengatakan bahwa ibu-ibu itu mungkin tidak nyaman diajak berbincang dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, para peserta mulai memperbaiki metode dan menyusun strategi baru. Mereka tidak lagi datang berombongan bila belum membuat janji. Mereka lebih banyak membagi diri agar lebih cepat akrab dengan warga.

Selama tahap orientasi, kami tidak memberi latihan khusus tentang metode FGD. Sekali lagi, saya dikuasai asumsi ketika merancang pelatihan. Karena di antara peserta sudah ada yang mahir memandu FGD, saya mengira dia akan membaginya kepada para peserta lain. Tetapi, ternyata sebagian peserta masih perlu dituntun untuk menyelenggarakan FGD.

Namun, saya pun belajar bahwa instruksi yang terlampau ketat bisa membatasi peserta untuk mengalami penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, soal jadwal, para peserta sebaiknya dibiarkan menetapkan jadwal kerja berdasarkan janji yang mereka buat bersama warga. Apalagi, sebagai orang muda, mereka mempunyai energi besar. Mereka bisa bekerja dari pagi sampai malam, sebagaimana seringkali terjadi dalam kerja pengorganisasian sebenarnya. Tidak jarang saya menyaksikan mereka bekerja sampai larut malam untuk merapikan data, mendiskusikan rencana hari berikutnya, mengadakan diskusi bersama atau mengejar informasi dari warga, dan menyelenggarakan layar tancap guna mengakrabkan diri dengan warga.

Orang muda memang suka berkumpul. Di hari-hari awal, sebagian peserta masih cenderung berkumpul sesama peserta, mungkin di bawah rumah (panggung) induk semang sambil makan atau minum teh atau di tepi sungai atau rumah kebun sambil menikmati kelapa muda. Bagi saya, kebiasaan ini awalnya tampak seperti kelemahan karena mereka belum berani jalan sendiri dan terutama karena hal itu akan mengurangi peluang bergaul dengan warga. Ini sudah sering saya lihat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) perguruan tinggi yang diselenggarakan di desa-desa di Sulawesi Selatan. Awalnya

saya berkeliling mencari mereka dengan semangat “berpatroli” untuk meminta mereka fokus bekerja demi mengenal sebanyak mungkin orang dan wilayah desa serta mencari sebanyak mungkin informasi. Tetapi, mereka dapat menyadarkan saya bahwa acara kumpul-kumpul itu juga merupakan cara mereka berbagi pengalaman dan kiat. Cara ini cukup efektif. Ketimbang setiap peserta harus mengalami semua yang dialami peserta lain, bukankah lebih baik berbagi pengalaman?

Setidaknya pada awal-awal program, saya hanya perlu sesekali mengingatkan agar mereka kembali berfokus untuk merefleksikan kegiatan harian. Dari sana biasanya muncul diskusi menarik yang membuka peluang menemukan wawasan baru dan mengidentifikasi saripati pembelajaran berdasarkan apa yang mereka cerap, sesuatu yang akan terus menumpuk setiap hari. Gabungan energi yang besar dan keseringan mereka berbagi pengalaman dan temuan membuat para peserta bisa belajar dengan cukup cepat. Pelan-pelan mereka pun mulai bisa menjaga ritme kerja kelompok dan menjalankan pembagian tugas yang mereka susun sendiri.

Pada tahap terakhir, para peserta dibagi ke dalam tiga kelompok baru untuk mempraktikkan kerja PAR yang sebenarnya di desa-desa yang belum pernah menjadi tempat pengorganisasian SRP Payo-Payo. Mengakrabkan diri menjadi tantangan pertama mereka. Sebagaimana di desa-desa sebelumnya, mereka berusaha menyesuaikan diri dengan kegiatan sehari-hari warga. Mereka menemui tantangan untuk menjelaskan maksud keberadaan mereka di desa. Padahal, sebagian besar peserta baru saja akrab dengan PAR, sehingga masih sulit bagi mereka untuk menjelaskannya dengan bahasa yang langsung dapat dipahami warga. Di sisi lain, sambutan warga tidak jauh berbeda. Warga lebih terbiasa dengan program-program pembangunan fisik, pengumpulan data konvensional, penyuluhan, atau pelatihan-pelatihan singkat. Mereka terbiasa dengan orang luar yang datang untuk melakukan sesuatu yang tampak, baik terhadap mereka maupun desa mereka. Seorang peserta bercerita, pada masa-masa awal tahap terakhir ketika dia dan kawan-kawannya mengawali praktik PAR di desa baru, sebagian warga bingung melihat mereka “tidak melakukan apa-apa” kecuali mengikuti keseharian warga. Dia kemudian mengungkapkan resep yang ditemukannya sendiri, “Tunjukkan kita benar-benar mau belajar dari mereka, maka mereka akan terbuka.” Dia belajar memetik cengkeh, menebang pohon di kebun, dan mandi di sungai. Keterbukaan warga itu akan memuluskan langkah selanjutnya untuk memulai kerja bersama.

Namun, keterbukaan saja belumlah cukup. Menanti terlalu lama untuk bisa memulai pekerjaan yang direncanakan merupakan siksaan

tersendiri bagi para peserta. Di salah satu desa, ketika mereka datang, seluruh warga—perempuan dan lelaki, dewasa maupun anak-anak—tengah sibuk memetik dan mengolah cengkeh pascapanen. Kepada saya, seorang peserta mengungkapkan frustrasi dan kepanikannya karena belum bisa memulai kerja apa pun. Setiap hari mereka ikut memetik dan “mematah” cengkeh guna mengakrabkan diri sembari mencari peluang untuk memulai pembicaraan lebih mendalam mengenai isu yang banyak dikeluhkan warga: kelangkaan air. Tetapi, warga begitu sibuk dengan cengkeh, sejak pagi hingga malam hari. Akhirnya, mereka banting setir dan mulai mengajak anak-anak muda, yang nisbi lebih memiliki waktu lowong ketimbang orang dewasa. Setelah beberapa minggu, mereka berhasil mengajak beberapa pemuda berkeliling di kawasan hutan untuk melihat keadaan sejumlah mata air—keterangan mengenai titik-titiknya diperoleh dari orang dewasa—dan bagaimana ekspansi pinus di sekitar mata air.

Sementara hal itu berlangsung, mereka juga harus membangun kerja tim yang efektif. Sebagian besar peserta baru saling berjumpa dalam pelatihan ini. Mereka berasal dari organisasi berbeda dengan tradisi dan bidang kerja yang berbeda pula. Karena itu, cara pandang mereka terhadap persoalan yang dihadapi orang desa juga nisbi beraneka ragam. Mereka berusaha untuk sering berdiskusi, hampir saban hari, untuk menentukan fokus penelitian yang realistis dalam kerangka waktu program yang tersisa. Dalam proses itu, mereka pun belajar memahami tabiat setiap anggota ketika mengajukan atau menyanggah pendapat, juga saling menyesuaikan gaya bercanda yang kadang menciptakan letupan. Ini bukan pekerjaan mudah bagi sebagian peserta dan tidak semua tim berhasil membangun kerja tim yang benar-benar padu sampai akhir program. Tetapi, sebagian besar peserta dapat melewatinya dengan baik. Seperti kata seorang peserta, “Kita baru mulai panas, program sudah selesai.”

Kalimat itu meluncur pada hari terakhir program saat sesi evaluasi. Dua belas peserta yang bertahan mengusulkan supaya durasi program diperpanjang, setidaknya menjadi lima atau enam bulan. Mereka mengakui, kemampuan dasar teknis sangat dibutuhkan untuk mulai bekerja bersama warga desa. Jenis pengetahuan dan keterampilan ini agak berbeda dari pengetahuan yang mereka kuasai sebelum mengikuti program. Bergantung pada latar belakang pendidikan dan organisasi masing-masing, sebagian besar peserta cukup menguasai pengetahuan teoretis atau keterampilan yang lazim digunakan di perkotaan, seperti keterampilan administratif, pengetahuan filsafat dan diskursus tentang tema-tema tertentu, serta kemampuan dasar pengumpulan data dalam penelitian konvensional. Ini menunjukkan bias kota dalam

dunia pendidikan di Indonesia, sebagaimana ditemui pada kegiatan Sekolah Danau Pauh, pelatihan serupa yang diselenggarakan anggota jaringan INSIST di Jambi.²⁰

Karena itu, mereka mengusulkan supaya dibekali pengetahuan teknis yang dibutuhkan untuk bekerja bersama warga desa, antara lain pemetaan partisipatif, pengetahuan dan keterampilan cocok tanam tanaman-tanaman tertentu yang akrab bagi warga desa tempat mereka akan bekerja (seperti cabai, padi, bawang, dan sayuran), pembuatan biogas, dan pemeliharaan ternak. Keterampilan semacam ini akan sangat memudahkan mereka untuk membuka komunikasi dan mempertahankan partisipasi warga lewat kerja-kerja yang sesuai kebutuhan nyata. Ketarampilan semacam itu memang mempunyai tingkat visibilitas tinggi dan bisa menjadi “alat atraksi”. Usulan-usulan ini merupakan kritik yang, menurut diskusi internal kami, akan menjadi bahan untuk memperbaiki rancangan program selanjutnya. Kami telah membicarakan untuk memasukkan elemen-elemen praktis dalam program ini. Kami berpikir untuk mengadakan pelatihan dalam dua level, dengan level kedua berisi pelatihan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kerja pengorganisasian.²¹

Beberapa hari menjelang berakhirnya program, para peserta menyusun laporan hasil penelitian secara berkelompok sesuai lokasi penelitian masing-masing. Mereka mengerjakannya selama empat hari, dan setiap hari harus menyerahkan naskah tulisan untuk saya periksa, sebelum kemudian direvisi. Ini tantangan tersendiri bagi mereka. Tantangan paling mendasar ialah kekurangan kosakata dalam merumuskan hasil temuan. Seringkali mereka mengulang-ulang idiom, slogan, dan bahkan syair lagu yang sudah akrab bagi mereka. Melakukan analisis merupakan tantangan selanjutnya. Mereka sulit membangun kerangka pikir tertentu dan menyusun temuan-temuan mereka berdasarkan kerangka tersebut. Kerangka acuan berpikir (*frame of references*) yang mereka terapkan ketika menghimpun data memang sudah cukup kaya, tetapi merumuskannya adalah pekerjaan lain. Setelah mendapat petunjuk awal, mereka memilah dan menata data temuan lapangan, menuliskannya dengan lebih rapi, sebelum tiba pada kerja yang paling berat: interpretasi. Mereka mengakui, menemukan hubungan-hubungan antarfenomena dan pola-pola tertentu yang mencuat dari hubungan antar-unit data adalah pekerjaan tersulit, apalagi dengan data yang kadang belum lengkap di beberapa bagian.

Menulis laporan tentang jalannya Sekolah Danau Pauh, Roem Topatimasang (Yayasan Mitra Aksi 2016: 17) mengungkapkan bagaimana dia sebagai pengampu pelatihan tersebut harus mengubah modul

20. Salah satu faktor penting yang menyebabkan kecenderungan ini adalah kerja aparatus budaya seperti media massa dan sistem pendidikan yang tidak memberi tempat bagi kehidupan desa (lihat Sirimorok 2008).

21. Kami memanfaatkan berbagai jenis keterampilan yang ada dalam jaringan INSIST. Di banyak tempat, anggota jaringan INSIST menggunakan pembuatan Sistem Informasi Desa sebagai “alat atraksi”. Kegiatan ini dimulai dengan survei dan pemetaan partisipatif (spasial dan sosial). Pemetaan mengandung aspek ketampakan yang menarik bagi warga, terutama karena salah satu produknya adalah peta tiga dimensi. Kegiatan selanjutnya adalah mengidentifikasi isu-isu generatif yang akan menentukan arah kerja pengorganisasian.

pelatihan setelah melihat tingkat pengetahuan para peserta akan diskursus gerakan dan pembangunan desa.

Semua perubahan tersebut akhirnya ditempuh setelah mengetahui bahwa wawasan, pengetahuan dasar, dan kemampuan analisis para siswa tentang isu-isu sosial pedesaan, ternyata memang masih sangat dasar (*rudimentary*), bahkan hampir semuanya baru pertama kali mengenal dunia gerakan sosial, organisasi nonpemerintah, dan kerja-kerja pengorganisasian masyarakat yang sesungguhnya.

Kondisi serupa juga saya jumpai pada para peserta PPD, meski pada tingkat yang berbeda. Tetapi, pada akhirnya mereka dapat menyelesaikan tugas penulisan laporan penelitian dengan nisbi baik, sehingga cukup layak untuk diterbitkan sebagai buku (Akhsan *et al.* 2016).

Bagi peserta, program ini telah mengubah pandangan mereka tentang desa maupun diri sendiri. Mereka mengaku jadi lebih tahu secara terperinci kehidupan orang desa.²² Salah satu peserta menyatakan, “Saya bisa belajar dengan cepat tentang perubahan komoditas di desa ini.” Peserta lain mengungkap bagaimana dia belajar banyak tentang apa saja yang terjadi di desa dengan melakukan jelajah desa (*transect walk*). Setelah tinggal di desa selama dua bulan lebih, mereka mengaku bahwa mereka jadi tahu beragam jenis persoalan yang dihadapi warga desa dan apa yang dimiliki warga untuk bertahan atau menghadapi setiap persoalan. Pertambahan pengetahuan peserta diiringi dengan perubahan sikap terhadap desa dan warganya. Sebelumnya, mereka mengaku bersikap dan diperlakukan sebagai tamu. Mereka disuguhi dan masih percaya pada gambaran romantik tentang desa seperti keramahtamahan, ikatan sosial yang kuat, atau pemandangan indah perdesaan.

Tampaknya program yang membawa mereka ke tempat baru (desa) dengan pandangan baru (lewat interaksi dengan fasilitator/warga/peserta lain) membuat mereka mengalami pengayaan perspektif. Mereka tidak sekadar mendapatkan informasi baru dari latar serupa (desa), mengingat sebagian sudah pernah bekerja di desa sebelumnya, tetapi juga mulai memperhatikan hal-hal baru di desa yang sebelumnya mereka abaikan. Dengan demikian, mereka dapat melihat desa secara lebih lengkap, dapat memindahkan-mindahkan fokus pencerapan untuk mengejar informasi baru. Dengan kata lain, mereka dapat melihat dengan kerangka-kerangka acuan yang baru (Moon 2004: 24–25). Mereka mengalami pembelajaran transformatif (*transformative learning*) yang memungkinkan mereka melihat dari berbagai sudut

22. Hal ini sudah tampak selama pelatihan. Pada semiloka pertama tahap kedua, mereka diminta melontarkan kata-kata sulit yang ditemukan selama berada di desa. Hasilnya mengejutkan: lebih dari seratus kata masih sulit dipahami mereka. Selama sehari penuh, para fasilitator menjelaskan sebagian daftar kata yang telah disebutkan, selebihnya mereka diminta untuk mencari penjelasan sendiri.

pandang atas fenomena-fenomena yang mereka saksikan dan pelajari di desa. Pembelajaran transformatif dicapai ketika seseorang dapat melakukan refleksi kritis terhadap keyakinan, asumsi, perspektif, dan nilai-nilai yang melekat pada diri sendiri atau orang lain (Sirimorok 2010a: 47).

Indikasi penting bahwa mereka mengalami pembelajaran transformatif ialah mereka dapat melakukan refleksi kritis terhadap perspektif dan asumsi mereka sendiri tentang desa, melampaui kemampuan baru menyerap informasi tentang desa. Mereka mengaku bahwa perspektif mereka, “perspektif orang kota, tidak selalu benar.” Dalam beberapa kesempatan, sebagian peserta mengaku betapa terbatasnya pengetahuan mereka tentang desa sehingga mereka merasa warga desa sudah menjadi guru bagi mereka. Dengan kata lain, pembelajaran telah meruntuhkan asumsi superioritas mereka sebagai orang terpelajar dari kota. Mereka mengungkapkan bahwa hal ini dapat terjadi karena metode yang diterapkan membuat mereka belajar lebih cepat untuk mendalami isu-isu penting di desa. Seorang peserta mengatakan, “Saya belum tentu punya pengetahuan sebanyak ini tentang desa sendiri, padahal cuma tinggal sebentar di desa ini.”

Indikasi selanjutnya ialah refleksi kritis itu dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan berdasarkan perspektif baru (Sirimorok 2010a: Bab 6). Seluruh peserta yang bertahan hingga akhir program menjadi punya keinginan kuat untuk bekerja dengan warga desa. Di hari terakhir program, seluruh peserta menyatakan akan bekerja di desa. Tentu program ini bukan satu-satunya penyebab mereka mencapai kemampuan dan komitmen itu, sebagian peserta telah akrab dengan wacana kritis atau pernah melakukan setidaknya kerja sosial. Tetapi, ketertarikan bekerja *untuk* orang desa dan tinggal lama di desa tidak banyak diminati anak-anak muda saat ini. Bahkan melawan kecenderungan masa kini yang menapakkan arus gerak keluar desa generasi muda.

Pada hari terakhir itu, saya mendengar langsung mereka bercerita tentang apa yang telah mereka capai. Duduk di sudut ruangan, saya mencatat dengan cepat sebanyak mungkin refleksi peserta yang berbicara bergantian. Dari catatan itu tampak bahwa mereka tidak hanya mengalami pengayaan perspektif dan penguatan komitmen, sebagaimana disebut di atas, tetapi juga menyusun gambaran mental tentang bangunan metodologis yang mungkin dapat membantu mereka menjalankan PAR di masa datang.

Seorang peserta mengungkapkan, di dalam PAR, “Data tidak akan banyak berguna tanpa keberhasilan membangun hubungan baik dengan warga desa.” Secara spesifik dia menyimpulkan bahwa kerja pengorganisasian melalui PAR hanya dapat dilakukan dengan

mengutamakan elemen (proses) “partisipatoris” dan (orientasi) “aksi” bersama warga, ketimbang sekadar (data) “penelitian”. Pencapaian ini cukup istimewa bila kita mengingat bahwa mereka adalah lulusan universitas yang sebagian besar belum mengenal PAR. Sebelum program, mereka lebih akrab dengan wacana dan praktik “penelitian” ketimbang dua aspek lain (partisipatoris dan aksi). Selama program berjalan pun sesekali saya mendengar bahwa awalnya para peserta menyangka program ini “seperti penelitian biasa”, merujuk pada metode konvensional wawancara, terutama dalam kerangka metode survei yang sudah akrab bagi mereka.

Mereka pun sudah awas dan mempertimbangkan bentuk relasi seperti apa yang dibutuhkan di dalam PAR. Mereka, misalnya, menyebutkan prinsip-prinsip dasar seperti “tidak datang menggurui” atau “lebih banyak mendengar” dan “tidak menjaga jarak dengan warga”. Semua ini menunjukkan bahwa para peserta bukan saja sudah mengerti watak partisipatoris PAR, tetapi juga bagaimana secara praktis mengoreksi perilaku di lapangan menurut watak tersebut. Sebaliknya, mereka pun belajar tetap kritis dalam melihat desa, sehingga “tidak meromantisasi apa yang dilihat, didengar, dan dialami di desa.”

Di level praktis, untuk menerapkan PAR, mereka menemukan bahwa penelitian seperti ini bisa dimulai dengan berbagai cara seperti bermain takraw atau voli, atau dari forum gosip dan arisan ibu-bu, atau bergaul dengan penjudi dan forum-forum terbatas minum arak yang jarang terjadi di desa. Cara-cara ini menunjukkan sikap keterbukaan dan menunda penghakiman (*judgement*) agar bisa menyelami kehidupan warga secara lebih utuh. Para peserta pun menyatakan bahwa mereka menikmati cara belajar secara partisipatoris dengan tinggal dan bekerja langsung bersama warga desa.

Setelah bergaul dan mendalami situasi desa, mereka mengungkapkan sejumlah kesimpulan umum dari temuan-temuan penelitian, semisal pentingnya dampak dari lepasnya tanah petani atau bagaimana kerja kolektif tergerus oleh berubahnya sistem cocok tanam yang dipicu oleh perubahan jenis tanaman (komoditas). Kedua kesimpulan ini menunjukkan bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perspektif kajian agraria kritis dan pendekatan penghidupan. Menghubungkan situasi desa dengan masyarakat lebih luas, mereka tiba pada kesimpulan bahwa petani adalah tulang punggung negara dengan menghasilkan makanan untuk semua. Dengan bercermin pada kehidupan desa, mereka juga merefleksikan diri masing-masing. Mereka, misalnya, menyebut “jadi lebih mengenali diri sendiri, kelebihan dan kelemahan diri” atau menyadari “susahnya orangtua di kampung mencari uang”, juga menjejaki kembali ingatan tentang kampung sendiri (Sirimorok 2016).

Catatan Penutup

Kembali ke hari pertama. Ketika duduk di ruangan menunggu seluruh peserta hadir sebelum memulai sesi pertama, saya dikejutkan seorang peserta yang datang agak belakangan. Dia berjalan agak kikuk ke dalam ruangan. Dia satu-satunya peserta pria yang mengenakan kemeja batik dan celana pantalon dengan sepatu mengilap. Dia berpakaian seperti itu sampai hari terakhir tahap orientasi. Belakangan saya tahu, dia tidak membawa satu pun pakaian yang lebih kasual. Untungnya, sebelum berangkat ke desa untuk tahap pelatihan selanjutnya, dia bisa menyempatkan diri pulang mengepak pakaian yang lebih sesuai untuk kerja lapangan. Dia mengaku salah paham terhadap model pelatihan ini. Dia tidak sendiri. Peserta lain menyangka pelatihan ini paling lama hanya beberapa minggu, meski di poster undangan pendaftaran yang disebar di media sosial telah dicantumkan durasi pelatihan adalah tiga bulan. Banyak calon peserta mengundurkan diri ketika pada tahap wawancara baru tahu mengenai lamanya durasi pelatihan. Beberapa kandidat yang diwawancarai bahkan menyangka sebagai wawancara kerja atau perekrutan pendamping desa.

Di sini tampak jelas kesalahpahaman meluas tentang kata “pelatihan”. Kata ini lebih banyak dimaknai sebagai kegiatan di dalam ruangan dengan metode seperti ceramah dan simulasi dalam kerangka waktu yang nisbi singkat. Demikian pula terkait muatan pelatihan itu sendiri, yang sebenarnya sudah kami antisipasi. Meski kurang menarik, kami memilih nama “Pelatihan Penelitian Desa” dengan asumsi bahwa “penelitian desa” lebih mudah dikenali oleh publik sasaran (orang muda) ketimbang dua kandidat istilah lain: pelatihan “pengorganisasian rakyat” dan “PAR” (pengorganisasian dan PAR dimasukkan ke dalam poster sebagai bagian dari muatan pelatihan). Tetapi, rupanya informasi tentang program ini tidak dipahami sepenuhnya oleh seluruh peserta. Ini terjadi salah satunya karena kedua istilah tersebut kurang familier bagi publik (orang muda) di Indonesia, setidaknya bagi mereka yang sempat mendaftar dan mengikuti wawancara PPD.²³ Wacana tentang kedua istilah tersebut masih beredar di ruang terbatas. Hal ini tampak dari kesulitan yang saya temui ketika mencari bahan-bahan dalam bahasa Indonesia untuk dijadikan bacaan wajib bagi para peserta.

Dari proses pelatihan ini, sebagaimana diuraikan di atas, tampak bahwa PAR, pengorganisasian, dan desa itu sendiri merupakan sesuatu yang asing bagi para peserta—orang-orang muda. Mengingat hal ini, saya merasa elemen-elemen penting dalam rancangan pelatihan (PAR, pengorganisasian, serta isu-isu agraria dan kehidupan desa) masih perlu lebih banyak diperkenalkan agar pelatihan seperti PPD,

23. Kami menerima 176 berkas pendaftar. Setelah meyeleksi semua berkas, kami mewawancarai 58 kandidat dan meluluskan 21 orang. Di samping pendaftaran terbuka itu, saya sendiri melakukan penyingkiran calon peserta dari organisasi-organisasi mitra di Sulawesi Selatan yang sekiranya tertarik.

atau STS secara umum, menarik lebih banyak peminat di kalangan orang muda. Karena itu, agaknya cukup wajar bila hanya dua belas peserta yang tersisa dari dua puluh satu peserta yang memulai PPD. Wajar pula bila para peserta yang tersisa mengusulkan agar PPD diperpanjang setidaknya dua kali lipat karena masih banyak hal yang harus mereka pelajari. Permintaan ini menunjukkan bahwa mereka telah belajar sehingga tahu bahwa mereka butuh belajar lebih banyak. Dari sudut pandang ini, kita dapat membaca pelatihan ini—juga tulisan ini—sebagai kampanye bagi pelatihan, PAR, dan pengorganisasian. Untuk kampanye ini, para alumni PPD sudah mulai menjalankan peran. Enam orang di antaranya menjalankan pengorganisasian yang dikerjakan SRP Payo-Payo, sementara para peserta lain kembali bekerja di organisasi masing-masing di Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Jawa Barat—sebagian besar melakukan kerja pengorganisasian dan penelitian di desa.

Mengingat kembali proses penyusunan rancangan PPD dan bagaimana peserta mengalami perubahan selama program, sulit bagi saya untuk tidak mengenang pelatihan singkat yang kami selenggarakan sebelas tahun lalu. Waktu itu, Roem Topatimasang sebagai pemandu tunggal bercerita kepada kami tentang proses pengorganisasian yang dikerjakannya di Tanimbar, Kepulauan Maluku.²⁴ Saat itu kami telah banyak menyelenggarakan pelatihan dengan model *live-in* dan menerapkan proses yang partisipatoris ketika berhadapan dengan peserta. Pada masa-masa itu, kami berfokus supaya para peserta dapat *mengetahui* kehidupan desa seutuh mungkin, belum sampai pada ajakan untuk *mengubah* keadaan desa. Kami baru tiba pada penelitian partisipatoris (*participatory research*). Kami memang sudah cukup akrab dengan kata “pengorganisasian”, tetapi bagaimana persisnya pengorganisasian berlangsung, kami belum mempunyai contoh, sehingga hal itu membuat kami belum percaya diri untuk mencobanya. Cerita tentang pengorganisasian di Tanimbar membuka mata kami. Cerita itu membuat kami banting setir, dari sekadar membuat anak-anak muda mengenali desa menjadi ajakan agar mereka dapat bertindak mengusahakan perubahan di desa. Itulah kekuatan sebuah cerita. Semoga cerita ini pun dapat menyumbang sesuatu untuk mengajak orang muda terlibat dalam upaya mewujudkan transformasi di perdesaan.

24. Potongan cerita ini tertulis sebagai contoh kasus dengan judul “Cerita dari Yamdena” dalam buku *Mengubah Kebijakan Publik* (2016: 16–23).

Daftar Pustaka

- A, AKHMAD *et al.* 2016. *Petani di Bawah Bayang-Bayang Pinus: Tentang Pengorganisasian Petani dan Ancaman Gagal Panen*. Makassar: Penerbit Inninawa bekerjasama dengan Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo dan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY).
- AKATIGA dan WHITE, B. 2015. "Maukah Saya Menjadi Petani?" *Inside Indonesia* 120 April–Juni. Diakses pada 19 April 2016. <http://www.insideindonesia.org/maukah-saya-menjadi-petani>.
- ANDERSON, B. 1988. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944–1946*. Diterjemahkan oleh JIMAN RIMBO. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- ASPINALL, E. 2005. *Opposing Soeharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Inonesia*. Stanford, California (Amerika Serikat): Stanford University Press.
- BATIRAN, K.B. 2011. "Tompobulu: Desa yang Dikeroyok Proyek." Dalam *Melawan Ketergantungan: Kebijakan Pangan dan Pengalaman Pengorganisasian Tiga Desa*, ditulis oleh AGUNG PRABOWO, KARNO B. BATIRAN, dan M. AAN MANSYUR, 21–85. Yogyakarta: INSISTPress bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) dan Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo.
- BACHRIADI, D. dan G. WIRADI. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Center (ARC), Bina Desa, KPA.
- CAHYONO, D.H. 2003. "Sekolah Terlibat: Rute Pendidikan Sejumlah Aktivis Muda Ornop Bersama Program Involvement-INSIST." Dalam *Wacana IV* (15): 195–217.
- COOKE, B. dan U. KOTHARI, penyunting. 2000. *Participation: The New Tyranny?* London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Zed Books.
- DEWAN PENGURUS INSIST. 2016. "Menyiapkan Generasi Baru." Laporan Akhir Dewan Pengurus 2011–2015 kepada Majelis Umum INSIST Ke-4 pada 11–13 Januari.
- DYSON, M. 2007. "My Story in a Profession of Stories: Auto Ethnography—An Empowering Methodology for Educators." Dalam *Australian Journal of Teacher Education* 32 (1): 36–48. <https://doi.org/10.14221/ajte.2007v32n1.3>.
- GOLOMBEK, S., penyunting. 2002. "What Works in Youth Participation: Case Studies from Around the World." Baltimore, Maryland (Amerika Serikat): International Youth Foundation bekerjasama dengan Nokia.
- HADI, S., D.H. CAHYONO, Y. NURHAYANDI, M.N. MAKKAH, A. YA'KUB, G. SUGIARTA, I. AGUSTIANI, A. HAYAT, dan S. ATAPARY. 2005. *Yang Mengakar Yang Menjalar: Kisah-Kisah Pengorganisasian Aktivis Sekolah Involvement*. Yogyakarta: INSISTPress.

- HICKEY, S. dan G. MOHAN. 2004. "Towards Participation as Transformation: Critical Themes and Challenges." Dalam *Participation: From Tyranny to Transformation?*, disunting oleh SAMUEL HICKEY dan GILES MOHAN, 3–24. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Zed Books.
- HUMPHREYS, M. 2005. "Getting Personal: Reflexivity and Autoethnographic Vignettes." Dalam *Qualitative Inquiry* 11 (6): 840–60. <https://doi.org/10.1177/1077800404269425>.
- INSIST. 2014. "Menelisis Ketangguhan Warga Pedesaan: Kasus Delapan Desa Indonesia." Laporan penelitian.
- JAMES, T. dan K. MCGILLICUDDY. 2001. "Building Youth Movements for Community Change." Dalam *The Non-profit Quarterly* 8 (4): 1–3.
- KHUDORI. 2016. "Desa: Mata Air vs Air Mata." Dalam *Koran Sindo* 26 April.
- LI, T.M. 2009. "To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Population." Dalam *Antipode* 41 (S1): 66–93. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2009.00717.x>.
- MOON, J.A. 2004. *A Handbook of Reflective and Experiential Learning: Theory and Practice*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): RoutledgeFalmer.
- National Geographic Indonesia*. 2015. "Kurangnya Petani Indonesia Masa Depan." 25 Juni. Diakses pada 10 Juli 2017. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/kurangnya-petani-indonesia-masa-depan>.
- NURYATNO, M.A. 2009. "Freire and Popular Education in Indonesia: Indonesian Society for Social Transformation (INSIST) and the Indonesian Volunteers for Social Transformation (INVOLVEMENT) Program." Dalam *Global Perspectives on Adult Education*, disunting oleh ALI A. ABDI dan DIP KAPOOR, 107–24. New York (Amerika Serikat): Palgrave Macmillan.
- PARKER, L. dan P. NILAM. 2013. *Adolescents in Contemporary Indonesia*. London and New York: Routledge.
- PURWANTO, S.A. 2011. "Otoetnografi: Mempelajari Kasus Pribadi Peneliti." Dalam *Antropologi Indonesia* 32 (2): 175–89.
- ROSENAU, P.M. 1992. *Post-Modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads and Intrusions*. Princeton, New Jersey (Amerika Serikat): Princeton University Press.
- SANGKOYO, H. 2003. "In Good Company, INSIST-KEPA Collaboration 1992–2002: A Reflection from the Indonesian End." Laporan tidak diterbitkan.
- SASTRAMIDJAJA, Y. dan S. NAAFS. 2015. "Youth Employment Prospect and Aspiration." Dalam *Inside Indonesia* 120 April–Juni. Diakses pada 19 April 2016. <http://www.insideindonesia.org/youth-employment-prospects-and-aspirations-3>.
- SCHOEPFLIN, T.A. 2009. "On Being Degraded in Public Space: An Autoethnography." Dalam *The Qualitative Report* 14 (2): 361–73.

- SCHUTZ, A. dan M.G. SANDY. 2011. *Collective Action for Social Change: An Introduction to Community Organizing*. New York (Amerika Serikat): Palgrave Macmillan.
- SCOONES, I. 2015. *Sustainable Livelihoods and Rural Development*. Rugby (Inggris): Practical Action Publishing.
- BADAN PUSAT STATISTIK (BPS). *Sensus Pertanian 2013*. <https://st2013.bps.go.id/dev2/index.php>
- SIRIMOROK, N. 2008. *Laskar Pemimpi: Andrea Hirata, Pembacanya dan Modernisasi Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- _____. 2010a. *Membangun Kesadaran Kritis: Kisah Pembelajaran Partisipatif Orang Muda*. Yogyakarta: INSISTPress.
- _____. 2010b. *Merdesa: Jatuh-Bangun Membangun Desa*. Yogyakarta: INSISTPress bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Rakyat Indonesia (YPRI) dan Development and Peace.
- _____. 2015a. *Hidup dalam Pasang Surut Danau*. Jakarta: Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR).
- _____. 2015b. "Menjauhkan Orang Muda dari Desa." Dalam *Pindai* 20 April. Diakses pada 14 Agustus 2016. <http://pindai.org/2015/04/20/menjauhkan-orang-muda-dari-desa/#>.
- _____. 2016. "Pengantar." Dalam *Petani di Bawah Bayang-Bayang Pinus: Tentang Pengorganisasian Petani dan Ancaman Gagal Panen*, disusun oleh AKHMAD AKHSAN *et al.*, 1-12. Makassar: Penerbit Innawa bekerjasama dengan Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo dan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY).
- SIRIMOROK, N. dan S. HAWI. 2015. *Melacak Kerja Kolektif di Dua Desa Sulawesi Selatan*. Makassar: Penerbit Innawa bekerjasama dengan Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo dan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY).
- TAN, J.H. dan R. TOPATIMASANG. 2003. *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*. Yogyakarta: INSISTPress bekerjasama dengan South East Asia Popular Communications Programme (SEAPCP).
- TOPATIMASANG, R., M. FAKIH, dan T. RAHARDJO, penyunting. 2016. *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*. Yogyakarta: INSISTPress.
- WALL, S. 2006. "An Autoethnography on Learning about Autoethnography." Dalam *International Journal of Qualitative Methods* 5 (2): 1-12. <https://doi.org/10.1177/160940690600500205>.
- YANOW, D. 2000. *Conducting Interpretive Policy Analysis*. Thousand Oaks, California (Amerika Serikat), London (Inggris), dan New Delhi (India): Sage Publications.
- Yayasan Mitra Aksi. 2016. "Sekolah Danau Pauh: Laporan Visual Ringkas." Jambi: Yayasan Mitra Aksi.